



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 109 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH
WILAYAH II KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah Wilayah II Tahun 2026-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
5. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 72);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH WILAYAH II KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026 – 2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah Wilayah II Kabupaten Bandung yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II adalah Unit Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung yang bertanggung jawab dalam melaksanakan urusan Pengelolaan Sampah.

7. Pejabat pengelola BLUD adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
8. Rencana Strategis BLUD UPTD Pengelolaan Sampah Kabupaten Bandung yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.

Pasal 2

- (1) BLUD UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II menyusun Renstra lima tahunan dengan mengacu kepada Renstra Dinas.
- (2) Pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada peningkatan pelayanan masyarakat, efisiensi, efektivitas, produktivitas yang berpedoman pada praktek bisnis yang sehat tanpa mengutamakan pengambilan keuntungan.
- (3) Pelaksanaan Renstra dilakukan dengan memperhatikan fleksibilitas penerapan BLUD UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II.

Pasal 3

- (1) Renstra disusun oleh Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II.
- (2) Renstra BLUD UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rencana pengembangan layanan;
 - b. strategi dan arah kebijakan;
 - c. rencana program dan kegiatan; dan
 - d. rencana keuangan.
- (3) Dokumen Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 4 Agustus 2026

BUPATI BANDUNG

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 4 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DESY ARYANTI, S.H., M.H.

Penata Tingkat I

NIP. 197709232010012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 109 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH
WILAYAH II KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2026-2029

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan dokumen pengajuan penerapan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen ini disusun sebagai salah satu persyaratan administratif dan substantif dalam rangka pengajuan penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Melalui penerapan pola BLUD diharapkan pengelolaan layanan persampahan di Kabupaten Bandung dapat dilaksanakan secara fleksibel, professional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dokumen administratif yang dipersyaratkan dalam pengajuan penerapan BLUD meliputi :

1. Dokumen Tata Kelola, yang memuat struktur organisasi, mekanisme pengelolaan, serta system pengendalian internal dalam penyelenggaraan layanan.
2. Standar Pelayanan Minimal (SPM), Sebagai pedoman dalam menjamin mutu dan standar pelayanan pengelolaan sampah kepada Masyarakat.
3. Rencana Strategis (Renstra), yang berisi arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta strategi pengembangan layanan persampahan dalam jangka menengah
4. Laporan Keuangan, yang menggambarkan kondisi keuangan unit layanan serta kesiapan penerapan sistem pengelolaan keuangan BLUD sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Dokumen Rencana Strategis ini menjelsakan tentang rencana strategis UPTD BLUD Pengelolaan Sampah Kabupaten Bandung periode Tahun 2026 s.d 2029 meliputi gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis, visi, misi tujuan dan arah kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja dan pendanaan. Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan UPTD BLUD Pengelolaan Sampah Kabupaten Bandung.

Kami menyadari masih banyak keterbatasan yang kami hadapi dan oleh karenanya dokumen Rencana Strategis ini akan dilakukan review secara periodik sesuai dengan kebutuhan untuk memastikan target dan rencana kinerja layanan pengelolaan sampah dapat dicapai secara efektif dan selaras

dengan tujuan dan target kinerja pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup sebagai OPD induknya.

Akhir kata, saya mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis ini, dan semoga dokumen yang tersusun ini telah memenuhi kriteria dalam penilaian usulan penerapan BLUD pada UPTD Pengelolaan Sampah Kabupaten Bandung.

Soreang, 30 April 2026
Kepala UPTD BLUD Pengelolaan Sampah
Wilayah II Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Bandung

HERI HERYANTO, S.T., M.I.P.
NIP. 198303232011011001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pengertian Rencana Strategis.....	3
1.3 Tujuan Penyusunan Rencana Strategis.....	4
1.4 Dasar Hukum Rencana Strategis.....	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN.....	7
2.1 Gambaran Singkat UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II.....	7
2.1.1 Mandat UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II.....	8
2.1.2 Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II	9
2.1.3 Lingkup Layanan UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II.....	12
2.1.4 Tantangan Dan Peluang Pengelolaaan Sampah Wilayah II.....	12
2.1.5 Skenario Pelaksanaan Bisnis UPTD BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II.....	14
2.1.6 Struktur Organisasi BLUD.....	15
2.2 Sumber Daya UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II.....	18
2.2.1 Sumber Daya Sarana.....	18
2.2.2 Sumber Daya Keuangan.....	21
2.2.3 Sumber Daya Manusia.....	22
2.3 Kinerja Pelayanan UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II DLH Kabupaten Bandung.....	25
2.4 Kinerja Keuangan.....	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	30
3.1 Identifikasi Pelaku.....	30
3.2 Identifikasi Masalah.....	32
3.2.1 Identifikasi Faktor Strategis Internal.....	32
3.2.2 Identifikasi Faktor Strategis Eksternal.....	34
3.2.3 Analisis Akar Masalah.....	36
3.2.4 Analisis Pemecahan Masalah.....	37
3.3 Isu Strategis.....	38

	Halaman
3.4 Rencana Pengembangan Layanan.....	39
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN.....	48
4.1 Visi BLUD Pengelolaan Sampah.....	50
4.2 Misi BLUD Pengelolaan Sampah.....	51
4.3 Nilai.....	53
4.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).....	54
4.5 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	56
4.6 Telaah Rencana Strategis Pengelolaan Sampah UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II DLH Kabupaten Bandung.....	57
4.7 Tujuan BLUD Pengelolaan Sampah.....	58
4.8 Sasaran Strategis.....	59
BAB V KEBIJAKAN, PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKAN PENDANAAN.....	60
5.1 Kebijakan.....	61
5.2 Program Strategis.....	62
5.3 Kerangka Pendanaan.....	63
5.4 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan (Terlampir).....	63
5.5 Perkiraan Biaya Operrasional (Terlampir).....	63
5.6 Proyeksi Pendapatan Pengembangan Layanan Pengolahan Sampah (Terlampir).....	63
BAB VI PENUTUP.....	64
LAMPIRAN	
Program Strategis dan Kegiatan Strategis Blud Pengelolaan Sampah Kabupaten Bandung	
Tabel Perkiraan Biaya Operasional	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Perubahan UPTD dan Daerah Pelayanannya.....	3
Gambar 2.1 Komposisi Sampah Kabupaten Bandung.....	11
Gambar 2.2 Pelayanan Persampahan UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II Kabupaten Bandung.....	12
Gambar 2.3 Skenario Pelaksanaan Bisnis.....	14
Gambar 2.4 Offtaker Energi Dan Industri Daur Ulang Sampah An-Organik Yang Terdata S.D Desember 2025.....	15
Gambar 2.5 Struktur Organisasi BLUD.....	15
Gambar 2.6 Jumlah SDM UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II.....	23
Gambar 2.7 Golongan Ruang SDM.....	23
Gambar 2.8 Tingkat Pendidikan Pada SDM UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II.....	24
Gambar 2.9 Penggolongan Generasi SDM.....	25
Gambar 3.1 Para Pihak dan Perannya dalam Penyelenggaraan BLUD.....	30
Gambar 3.2 Peran Seluruh Stakeholder Dalam Penyelenggaraan BLUD.....	32
Gambar 3.3 Analisis Akar Masalah UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II.....	36
Gambar 3.4 Analisis Pemecahan Masalah UPTD BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II Kabupaten Bandung.....	37
Gambar 3.5 Siklus Hidup Maggot.....	41

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Pembagian Kecamatan Pada UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah I-V..... 2
Tabel 2.1	Mandat UPTD Pengelolaan Sampah Sesuai Dokumen Perencanaan..... 8
Tabel 2.2	Wilayah Layanan UPTD Pengelolaan Sampah..... 10
Tabel 2.3	Hasil Perhitungan Timbulan Sampah Perkapita Kab Bandung..... 10
Tabel 2.4	Komposisi Sampah Kabupaten Bandung..... 11
Tabel 2.5	Lingkup Layanan UPTD BLUD Pengelolaan Sampah.... 12
Tabel 2.6	Tugas dan Tanggungjawab Pejabat Pengelola BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II Kabupaten Bandung... 16
Tabel 2.7	Armada Pengangkutan Sampah..... 19
Tabel 2.8	Sarana Pengolahan Dan Pemrosesan Akhir Sampah.... 19
Tabel 2.9	Kantor Koperasi..... 21
Tabel 2.10	Tabel Anggaran Pengelolaan Sampah Tahun 2025..... 21
Tabel 2.11	Jumlah Sumber Daya Manusia UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II Kabupaten Bandung..... 22
Tabel 2.12	Golongan Ruang SDM..... 23
Tabel 2.13	Formasi SDM..... 23
Tabel 2.14	Sumber Daya Manusia (SDM) UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II Kabupaten Bandung..... 24
Tabel 2.15	Penggolongan Generasi SDM di UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II..... 24
Tabel 2.16	Ketenagakerjaan di BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II..... 25
Tabel 2.17	Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Ditingkat Hulu Dan Tingkat Hilir Pada Tahun 2025..... 26
Tabel 2.18	Realisasi Anggaran Pada Tahun 2025..... 27
Tabel 3.1	Para Pihak Dan Perannya Dalam Penyelenggaraan BLUD..... 30
Tabel 3.2	Peran Seluruh Stakeholder Dalam Penyelenggaraan BLUD..... 32
Tabel 3.3	Rencana Strategis Periode 2026-2029..... 38
Tabel 3.4	Rasionalitas Isu Strategis Yang Dihadapi BLUD..... 39
Tabel 3.5	Bank Sampah Yang Aktif Di Wilayah Pelayanan BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II DLH Kabupaten Bandung..... 43
Tabel 4.1	Nilai-Nilai Pengelola BLUD Pengelolaan Persampahan Wilayah II DLH Kabupaten Bandung..... 53
Tabel 4.2	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)..... 55
Tabel 4.3	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... 56

	Halaman
Tabel 4.4 Rencana Strategis Pelayanan Persampahan.....	57
Tabel 4.5 Isu Strategis Dan Tujuan Strategis.....	58
Tabel 5.1 Contoh Kerangka Pendanaan UPTD BLUD Pengelolaan Sampah.....	63

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Bandung merupakan entitas strategis di Jawa Barat yang memiliki luas wilayah mencapai 176.238 hektar dengan topografi unik berupa cekungan dataran rendah yang dikelilingi pegunungan. Sebagai wilayah penyangga utama Metropolitan Bandung Raya dengan jumlah penduduk lebih dari 3,8 juta jiwa, kabupaten ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis dengan sektor industri pengolahan sebagai kontributor terbesar PDRB, mencapai lebih dari 50 persen.

Melalui visi pembangunan "BEDAS" (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera), Kabupaten Bandung kini bertransformasi menuju tata kelola yang lebih mandiri dan berkelanjutan, terutama dalam pelayanan publik. Fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah memperkuat infrastruktur dan kelestarian lingkungan, termasuk melalui inovasi kelembagaan seperti pembentukan BLUD Persampahan untuk mengatasi tantangan timbulan sampah perkotaan yang selaras dengan target nasional Indonesia Emas.

Pengelolaan sampah merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Bandung seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, urbanisasi serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan volume sampah yang tidak diimbangi dengan fasilitas pengelolaan yang efektif dan efisien, berpotensi berbagai dampak negatif, baik terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, maupun estetika wilayah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung memiliki 4 UPTD Pengangkutan Sampah diantaranya UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Soreang, UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek, UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Baleendah dan UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Ciparay serta 1 UPTD Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah. Pada pelaksanaannya 4 UPTD Pengangkutan Sampah melakukan pelayanan pengangkutan sampah pada wilayah kerjanya masing-masing dari sumber menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Sementara itu, UPTD Pemanfaatan dan Pengelolaan Sampah membawahi tempat pengelolaan sampah, meliputi TPST Oxbow Cicukang, TPST Citaliktik, PUSPA Jelekong, TPS 3R Pemda, dan TPS 3R Jalak Harupat.

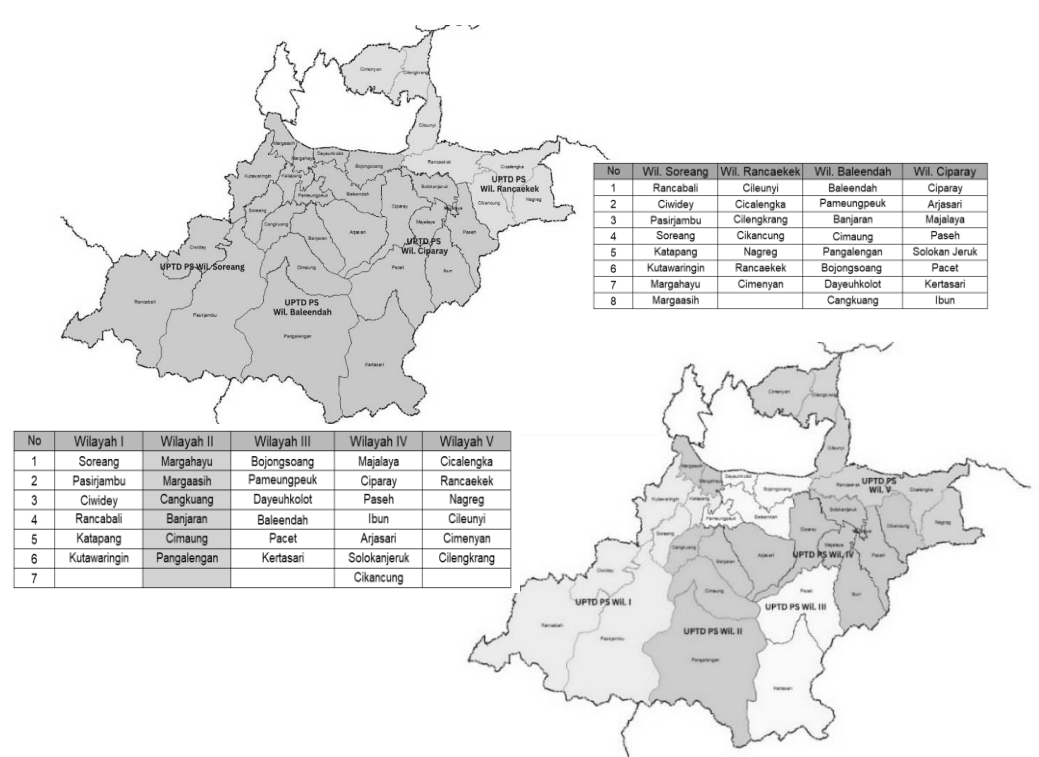
Dengan diterbitkannya Surat Edaran Sekda Jawa Barat, Nomor: 6174/PBLS.04/DLH tentang Peringatan dan Pembatasan Pembuangan Sampah ke TPPAS Regional Sarimukti yang menyatakan bahwa setiap daerah diberi batas maksimal tonase sampah salah satunya Kabupaten Bandung sebesar 280 ton/hari, maka untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan fungsi UPTD dalam pengelolaan sampah secara berimbang antara pengurangan dan penanganan/pengolahan, maka kapasitas kelembagaan 4 UPTD Pengangkutan Sampah dan 1 UPTD Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah ditingkatkan menjadi 5 UPTD Pengelolaan Sampah (sesuai Rekomendasi Gubernur Jawa Barat, Nomor 7899/OT.03/ORG, Tanggal 29 September 2025, perihal Rekomendasi Persetujuan Pembentukan

UPTD dan Perubahan Nomenklatur UPTD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung).

UPTD Pengelolaan Sampah yang baru dibentuk tersebut meliputi UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah I, UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II, UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II, UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah III, UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah IV, dan UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah V. Ada 31 kecamatan di Kabupaten Bandung kemudian dikelompokkan menjadi 6 sampai 7 kecamatan yang masuk kedalam masing-masing UPTD Pengelolaan Sampah wilayah I – V yang ditentukan berdasarkan rentang kendali serta beban kerja yang didasari dari jumlah desa pada masing-masing kecamatan. Pembagian kecamatan tersebut tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Pembagian Kecamatan Pada UPTD Pengelolaan Sampah

No.	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Wilayah IV	Wilayah V
1	Soreang	Margahayu	Bojongsoang	Majalaya	Cicalengka
2	Pasirjambu	Margaasih	Pameungpeuk	Ciparay	Rancaekek
3	Ciwidey	Cangkuang	Dayeuhkolot	Paseh	Nagreg
4	Rancabali	Banjaran	Baleendah	Ibun	Cileunyi
5	Katapang	Cimaung	Pacet	Arjasari	Cimencyan
6	Kutawaringin	Pangalengan	Kertasari	Solokanjeruk	Cilengkrang
7				Cikancung	



Gambar 1.1 Perubahan UPTD Dan Daerah Pelayanannya

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Unit Pelaksana Teknis Daerah dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD yang dapat memberikan keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dan mengoptimalkan potensi pengelolaan sampah berbasis nilai tambah, meningkatkan kualitas

pelayanan, serta mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Untuk mendukung implementasi BLUD pada UPTD Pengelolaan Persampahan Wilayah II DLH Kabupaten Bandung, maka perlu disusun Rencana Strategis sebagai acuan internal yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi.

1.2 Pengertian Rencana Strategis

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pasal 41 menyatakan bahwa Renstra merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis. Renstra menjelaskan terkait :

1. Rencana pengembangan layanan;
2. Strategi dan arah kebijakan;
3. Rencana program dan kegiatan; dan
4. Rencana keuangan.

1.3 Tujuan Penyusunan Rencana Strategis

Hal-hal yang dijadikan tujuan penyusunan Renstra meliputi:

- a. Menjadi pedoman arah kebijakan dan strategis dalam penyelenggaraan pengelolaan persampahan pada UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II DLH Kabupaten Bandung
- b. Mendukung penerapan pola pengelolaan keuangan BLUD melalui perencanaan kinerja yang terukur, efektif, dan efisien
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang persampahan yang memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, baik dari sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun potensi pendapatan dari layanan persampahan.

1.4 Dasar Hukum Rencana Strategis

Dasar hukum untuk menyusun Rencana Strategis diantaranya adalah:

- 1). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 2). Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- 3). Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- 4). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 5). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
- 6). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 7). Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah
- 8). Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 9). Peraturan Bupati Bandung Nomor 126 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
- 10). Peraturan Bupati Bandung Nomor 346 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 68 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
- 11). Peraturan Bupati 338 Tahun 2025 Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2043
- 12). Peraturan Bupati Bandung Nomor 282 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

1.5 Sistematika Penulisan

Sub bab ini menjelaskan terkait sistematika penyusunan dokumen Rencana Strategis dengan menampilkan pembagian bab dan ini dari masing-masing bab. Sistematika penyusunan dokumen Renstra minimal adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Pengertian Renstra

1.3 Tujuan Penyusunan Renstra

1.4 Dasar Hukum Renstra

1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Gambaran Singkat UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II

2.2 Struktur Organisasi dan Tata Laksana

2.3 Kinerja Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Masalah

3.2 Isu Strategis

3.3 Rencana Pengembangan Layanan

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 Visi

4.2. Misi

4.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

4.4 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLs)

4.5 Telaah Rencana Strategis Instansi Teknis Pengelolaan Sampah

4.6 Tujuan

4.7 Sasaran

4.8 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI PENUTUP
LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Gambaran Singkat UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II

UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung yang dibentuk untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pelayanan persampahan dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

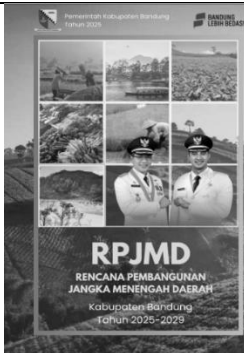
Tugas utama UPT Pengelolaan Sampah sebagaimana Peraturan Bupati Bandung Nomor 346 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, adalah melaksanakan kegiatan operasional dan kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan dan pelayanan persampahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut UPT Pengelolaan Sampah Kabupaten Bandung menjalankan fungsi:

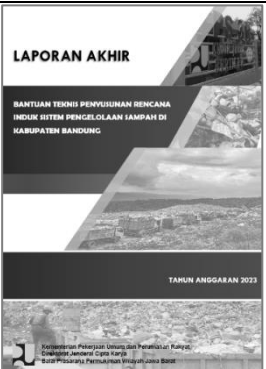
1. pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan rencana operasional;
2. pelaksanaan pembinaan, pengembangan serta pengendalian terhadap pelaksanaan pendampingan pemanfaatan pengolahan sampah yang dilaksanakan masyarakat, pengolahan sampah di fasilitas pengolah dan pelayanan pengangkutan sampah;
3. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pendampingan pemanfaatan pengolahan sampah yang dilaksanakan masyarakat, pengolahan sampah di fasilitas pengolah dan pelayanan pengangkutan sampah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
4. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja pendampingan pemanfaatan pengolahan sampah yang dilaksanakan masyarakat, pengolahan sampah di fasilitas pengolah dan pelayanan pengangkutan sampah.

2.1.1 Mandat UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II

Mandat pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung dinyatakan dalam RPJMD dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 serta dinyatakan dalam Rencana Induk Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Mandat UPTD Pengelolaan Sampah Sesuai Dokumen Perencanaan

 Program Prioritas Daerah RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 (Perda No. 11 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029)	Visi: Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas Misi: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Tujuan: Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah Berbasis Infrastruktur yang Terintegrasi, Berketahanan dan Berkelanjutan Sasaran: Meningkatnya efektivitas pengelolaan lingkungan hidup dan Perubahan iklim yang berkelanjutan Outcome: Meningkatnya tata kelola persampahan Indikator: Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah, dengan Target (poin) <table><tr><th>Th 2026</th><th>Th 2027</th><th>Th 2028</th><th>Th 2029</th><th>Th 2030</th></tr><tr><td>40.7</td><td>40.9</td><td>43</td><td>43.2</td><td>43.5</td></tr></table> Program Prioritas: Program Pengelolaan Persampahan Target Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai Indikator Utama Pemerintahan (IUP) pada RPJPD <table><tr><th>URAIAN</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr><tr><td>Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)</td><td>17,58</td><td>19,92</td><td>22,58</td><td>25,59</td><td>29,00</td></tr><tr><td>Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpul</td><td>44,51</td><td>53,43</td><td>63,67</td><td>83,67</td><td>92,87</td></tr></table>	Th 2026	Th 2027	Th 2028	Th 2029	Th 2030	40.7	40.9	43	43.2	43.5	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	17,58	19,92	22,58	25,59	29,00	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpul	44,51	53,43	63,67	83,67	92,87	RPJMD halaman 403, 465, 515
Th 2026	Th 2027	Th 2028	Th 2029	Th 2030																										
40.7	40.9	43	43.2	43.5																										
URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029																									
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	17,58	19,92	22,58	25,59	29,00																									
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpul	44,51	53,43	63,67	83,67	92,87																									

	an Sampah (% RT)																								
 Renstra DLH (Perbup Nomor 282 Tahun 2025 tentang Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029)	NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan: Meningkatnya efektifitas pengelolaan lingkungan hidup dan perubahan iklim yang berkelanjutan Tujuan: Meningkatnya kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim Sasaran: Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan, dengan target sebagai berikut : <table><tr><th>URAIAN</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th></tr><tr><td>Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)</td><td>17,58</td><td>19,92</td><td>22,58</td><td>25,59</td><td>29,00</td></tr><tr><td>Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpul an Sampah (% RT)</td><td>44,51</td><td>53,43</td><td>63,67</td><td>83,67</td><td>92,87</td></tr></table>						URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	17,58	19,92	22,58	25,59	29,00	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpul an Sampah (% RT)	44,51	53,43	63,67	83,67	92,87	Perbup Renstra DLH 2025-2029 halaman 99 sd 102
URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029																				
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	17,58	19,92	22,58	25,59	29,00																				
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpul an Sampah (% RT)	44,51	53,43	63,67	83,67	92,87																				
 Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2045 (Perbup No.	Target pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung tahun 2025 sebesar 77,1% sampai dengan tahun 2029 sebesar 100%. Rencana pengurangan sampah diperkotaan dilakukan melalui TPS 3R, bank sampah/bank sampah tematik, rumah kompos, home komposting skala RT/RW (LCO, komposter dan lain-lain) dan sektor informal, sedangkan di pedesaan dilakukan melalui TPS3R Magot. Sedangkan rencana penanganan dilakukan melalui pengolahan RDF di TPST yang berada di Jelekong, Oxbow, Citaliktik, operasionalisasi TPST baru yaitu Babakan dan Nagreg, pengolahan dengan pirolisis di Jelekong dan insinerator di Citaliktik, Oxbow, Babakan dan						Dokume n RISPS Kabupat en Bandung halaman 4-19, 4-20																		

338 Tahun 2025 tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2043)	Nagreg dan rencana pengangkutan sampah residu ke TPA Sarimukti/TPA Legok Nangka.					
	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	Perkotaan					
	Timbulan (ton/hari)	1709,13	1727,46	1745,79	1764,12	1782,45
	terkelola (ton/hari)	1317,04	1430,24	1545,54	1662,94	1782,45
	% Terkelola	77,1%	82,8%	88,5%	94,3%	100,0%
	%Tidak Terkelola	22,9%	17,2%	11,5%	5,7%	0,0%
	Pedesaan					
	Timbulan (ton/hari)	22,30	22,50	22,80	23,00	23,20
	terkelola (ton/hari)	9,20	16,30	22,80	23,00	23,20
	% Terkelola	41,3%	72,4%	100,0%	100,0%	100,0%
	%Tidak Terkelola	58,74%	27,56%	0,00%	0,00%	0,00%
	Perkotaan & Pedesaan					
	Timbulan (ton/hari)	1731,43	1749,96	1768,59	1787,12	1805,65
	terkelola (ton/hari)	1326,24	1446,54	1568,34	1685,94	1805,65
	% Terkelola	76,60%	82,66%	88,68%	94,34%	100,00%
	%Tidak Terkelola	23,40%	17,34%	11,32%	5,66%	0,00%
Pada TPST oxbow Cicukang terdapat mandat berupa penanganan sampah melalui pengolahan, yaitu :						
URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	
Pengolaha n RDF (Oxbow) (ton/hari)	20	20	20	20	20	
Pengolaha n Pirolisis/ Incenerator (Incenerato r Oxbow) (ton/hari)	10	10	10	10	10	
Perbup nomor 346 tahun 2025	UPTD Pengelolaan Sampah wilayah II memberikan layanan di 6 kecamatan; 1. Margahayu, 2. Margaasih. 3, Cangkuang. 4. Banjaran. 5. Cimaung dan 6. Pangalengan					

Mandat UPTD Pengelolaan Sampah wilayah II Kabupaten Bandung sebagaimana dijelaskan diatas menjadi dasar dalam peumusan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh UPTD BLUD pengelolaan sampah wilayah II periode 2026 -2029.

2.1.1 Wilayah Kerja UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II

UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II berlokasi di kawasan TPST Oxbow Cicukang, yang beralamat di Jalan Inspeksi Citarum, Desa Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung. Lokasi ini sekaligus menjadi pusat kegiatan operasional pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah, termasuk pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang menghasilkan Refuse Derived Fuel (RDF) sebagai bahan bakar alternatif dan BSF sebagai pakan alternatif. Wilayah kerja layanan pengelolaan sampah UPTD Pengelolaan Sampah wilayah II mencakup 6 kecamatan dan memberikan layanan bagi 52 desa/kelurahan.

Tabel 2.2 Wilayah Layanan UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II

KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	LUAS WILAYAH (Ha)	JUMLAH PENDUDUK (jiwa)	JUMLAH RUMAH TANGGA(KK)	TIMBULAN SAMPAH (ton/hari)
Margahayu	5	1.066	121.324	30.331	57,02
Margaasih	6	1.815	155.740	38.935	73,20
Cangkuang	7	2.364	87.831	21.958	41,28
Banjaran	11	3.564	143.325	35.831	67,36
Cimaung	10	5.975	96.258	24.065	45,24
Pangalengan	13	21.659	169.257	42.314	79,55
Jumlah	52	36.443	773735	193.434	363,65

Perhitungan menggunakan standar timbulan 0,47 kg/orang/hari, yaitu berdasarkan hasil sampling bulan Agustus-September 2023 pada penyusunan dokumen RISPS Tahun 2025-2043, dengan perhitungan ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 2.3 Hasil Perhitungan Timbulan Sampah Perkapita Kab Bandung

Jenis	Kawasan	Hasil Sampling	Satuan	Jumlah Satuan	Timbulan kg/hari	Sumber
Permukiman	Perkotaan	0.31	Kg/o/hari	3,558,449	1,103,119	BPS
	Perdesaan	0.13	Kg/o/hari	167,747	21,807	BPS
Non Permukiman	Sekolah	0.05	Kg/siswa/hari	773,589	38,679	Disdik
	Retail/Perdagangan	0.23	Kg/karyawan/hari	2,109	485	Open Data
	Industri	0.08	Kg/karyawan/hari	1,878,757	150,301	Open Data
	Rumah Sakit	0.27	Kg/bed/hari	1,500	405	Kemkes
	Pasar	0.82	Kg/m2/hari	418,800	343,416	Disdagingin
	Terminal	0.04	Kg/m2/hari	9,000	360	Open Data
	Jalan	0.06	Kg/m/hari	1,160,293	69,618	DPUTR
	Hotel	0.55	Kg/bed/hari	2,550	1,403	Open Data
	Taman	0.05	Kg/m2/hari	108,000	5,400	Open Data
	Kantor	0.14	Kg/pegawai/hari	11,946	1,672	Open Data

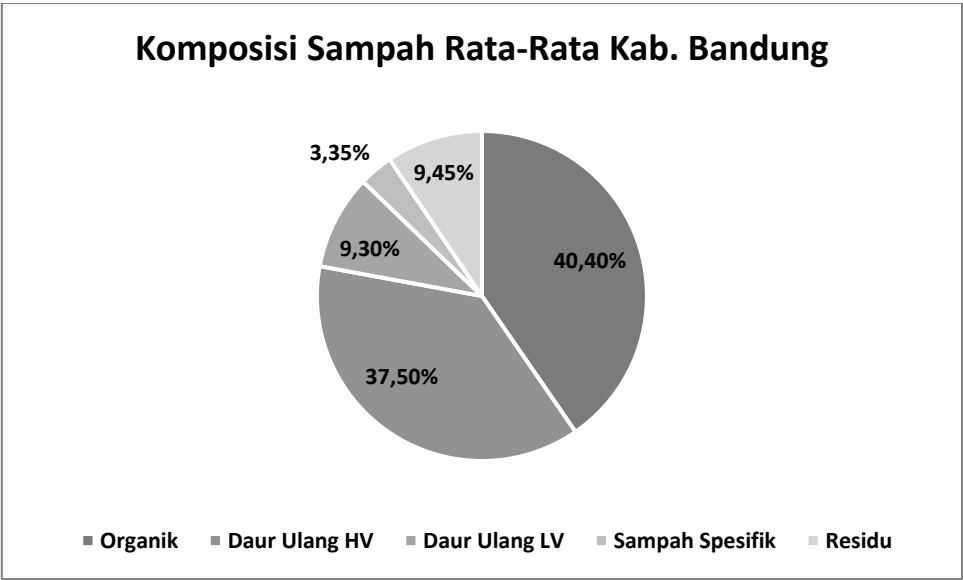
Jenis	Kawasan	Hasil Sampling	Satuan	Jumlah Satuan	Timbulan kg/hari	Sumber
Jumlah Total					1,736,665	
Timbulan sampah perkapita (kg/o/hari)					0.47	

Sumber : Dokumen RISPS Tahun 2025-2043

Adapun komposisi sampah di Kabupaten Bandung ditunjukkan oleh tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.4 Komposisi Sampah Kabupaten Bandung

Sampah Makro	Sampah Mikro	Presentasi (%)		
		Permukiman	Non-Permukiman	Rata-rata
Organik	Sisa Makanan	25.3%	18.3%	21.8%
	Compostable	7.7%	29.5%	18.6%
	Jumlah Organik			40.4%
Daur Ulang High Value	Plastik Lembaran	10.3%	15.1%	12.7%
	Plastik Kemasan	7.0%	5.2%	6.1%
	Kerasan	3.1%	1.6%	2.4%
	duplek	6.5%	5.3%	5.9%
	kertas	2.8%	3.2%	3.0%
	Kardus	2.3%	3.4%	2.8%
	Logam/Kaleng	0.9%	0.6%	0.7%
	Botol Kaca	0.5%	0.2%	0.4%
	kain/ tekstil	5.6%	1.3%	3.5%
	Jumlah Daur Ulang HV			37.5%
Sampah Spesifik	e-waste	0.6%	0.0%	0.3%
	Inert	3.1%	1.5%	2.3%
	B3	1.1%	0.3%	0.7%
	Jumlah Sampah Spesifik			3.3%
Daur Ulang Low Value	plastik kecil	7.5%	4.4%	5.9%
	kertas lusuh	4.2%	2.7%	3.4%
	Jumlah Daur Ulang LV			9.3%
Residu	Karet	0.8%	0.5%	0.7%
	sterofoam	1.4%	0.9%	1.2%
	lain-lain	2.4%	1.3%	1.9%
	diapers	6.9%	4.7%	5.8%
	Jumlah Residu			9.5%
Jumlah		100.0%	100.0%	100.0%



Gambar 2.1 Komposisi Sampah Kabupaten Bandung

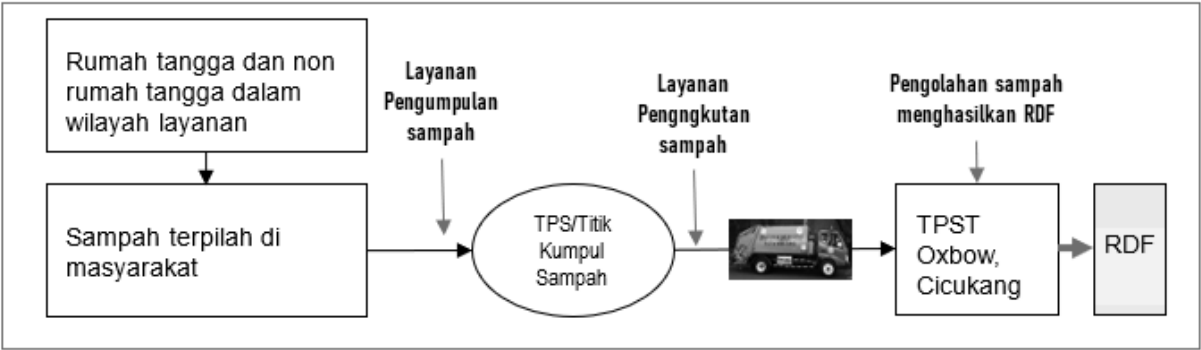
2.1.2 Lingkup Layanan UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II

Layanan UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah 2 Kabupaten Bandung adalah sesiai dengan mandat dan sasaran dalam Rencana Strategis DLH untuk wilayah II dengan prinsip pengelolaan sampah tuntang dari hulu sampai hilir sebagai berikut.

Tabel 2.5 Lingkup Layanan UPTD BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II

PENGELOLAAN SAMPAH DI HULU	PENGELOLAAN SAMPAH DI HILIR
1. Promosi/edukasi kepedulian masyarakat 2. Layanan pengumpulan sampah di tingkat rumah tangga 3. Layanan pengangkutan sampah	1. Pengolahan sampah melalui pengoperasian TPST Oxbow Cicukang, 2. Pengelolaan produk hasil pengolahan sampah bekerjasama dengan offtaker

Proses bisnis Pengelolaan Sampah wilayah II di Kabupaten Bandung dari hulu sampai hilir adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Pelayanan Persampahan UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II Kabupaten Bandung

2.1.3 Tantangan Dan Peluang Pengelolaan Sampah Wilayah II

Dalam pengajuan usulan penerapan PPK BLUD UPTD menyampaikan *Surat Pernyataan untuk Meningkatkan Kinerja* yang berarti UPTD BLUD akan mencapai kinerja yang lebih baik, optimal dan berkelanjutan. Tantangan riil yang dihadapi UPTD BLUD pengelolaan sampah II adalah:

- Memastikan UPTD mampu menjangkau wilayah layanan di semua kecamatan, desa/kelurahan
- Memastikan semua desa/kelurahan dapat terjangkau layanan
- Memastikan semua rumah tangga memilah sampah
- Memastikan semua rumah tangga mendapat layanan pengumpulan sampah
- Memastikan semua sampah terkumpul terangkut dan diolah di TPST
- Memastikan TPST dapat dikelola secara efisien, optimal dan berkelanjutan

Tantangan mendasar dalam menjangkau layanan pengelolaan sampah di hulu dan hilir paling tidak adalah sebagai berikut:

Terbatasnya tenaga promotor/edukator dalam meningkatkan kepedulian masyarakat dan penjangkauan masyarakat sebagai pelanggan yang akan berimplikasi dalam peningkatan pendapatan jasa layanan BLUD

1. Terbatasnya sarana pemilahan sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga
2. Terbatasnya tenaga operator layanan pengumpulan sampah dari Rumah Tangga sampai ke TPS/depo pengumpulan sampah
3. Terbatasnya armada pengangkutan sampah untuk mampu mengangkut semua timbulan sampah di wilayah layanan
4. Terbatasnya tenaga pendukung untuk mengelola hubungan dengan pelanggan, pengelolaan data pelanggan, manajemen aset dan layanan administrasi pelayanan.

Konsekuensi logis dalam menghadapi tantangan diatas adalah tersedia dan cukupnya sumber daya yang dibutuhkan BLUD dalam menjalankan mandatnya mencakup:

- Sumber daya keuangan/biaya operasi
- Sumber daya sarana pengelolaan sampah di hulu untuk sarana pemilahan dan pengumpulan sampah dan pengelolaan sampah di hilir untuk sarana pengolahan sampah dengan teknologi yang sesuai dan tepat guna
- Sumber daya manusia yang cukup dengan kompetensi yang memenuhi sesuai kebutuhan.

Peluang yang bisa didapatkan dengan perubahan UPTD menjadi BLUD adalah diberikannya fleksibilitas dalam pengelolaan sumberdaya keuangan dan non keuangan yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja. UPTD BLUD memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya meliputi;

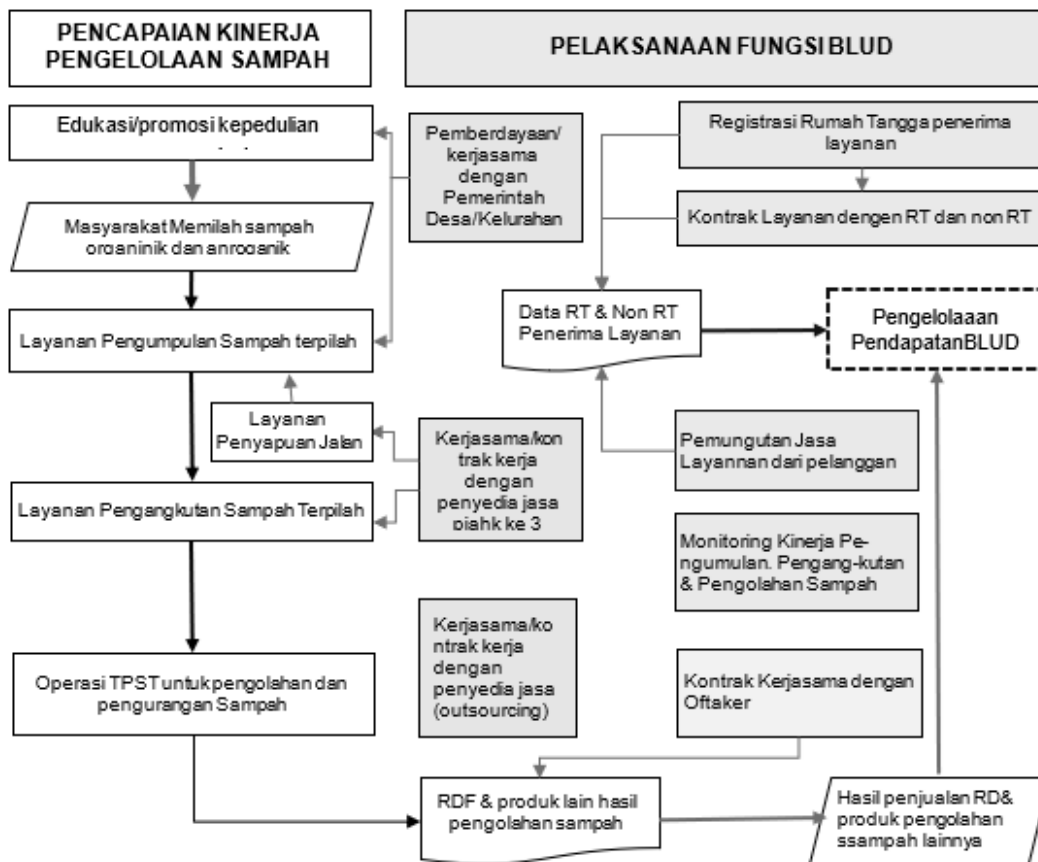
1. Fleksibilitas dalam Pengelolaan Pendapatan
2. Fleksibilitas dalam. Pengelolaan Belanja
3. Fleksibilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa

4. Fleksibilitas dalam Pengelolaan Utang dan Piutang
5. Fleksibilitas dalam Penetapan Tarif Layanan
6. Fleksibilitas dalam Pengelolaan SDM
7. Fleksibilitas dalam Pengelolaan Kerja Sama
8. Fleksibilitas dalam Pengelolaan Investasi
9. Fleksibilitas dalam Pengelolaan SILPA dan Defisit
10. Fleksibilitas dalam pengelolaan Remunerasi

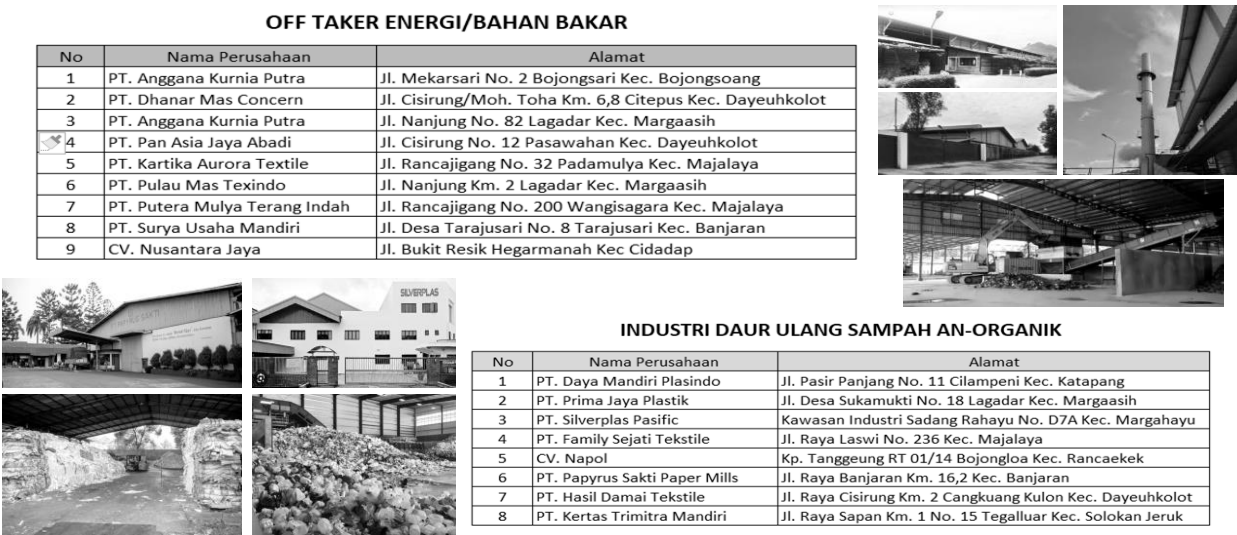
Atas peluang dalam mengatasi tantangan pengelolaan kinerja yang optimal dan berkelanjutan di atas UPTD Pengelolaan Sampah wilayah II dan didukung oleh Dinas Lingkungan Kabupaten Bandung sebagai OPD induknya untuk mengajukan usulan penerapan PPK BLUD.

2.1.1 Skenario Pelaksanaan Bisnis UPTD BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II

Dengan memanfaatkan fleksibilitas UPTD BLUD Pengelolaan Sampah wilayah II skenario pelaksanaan bisnis digambarkan sebagai berikut:



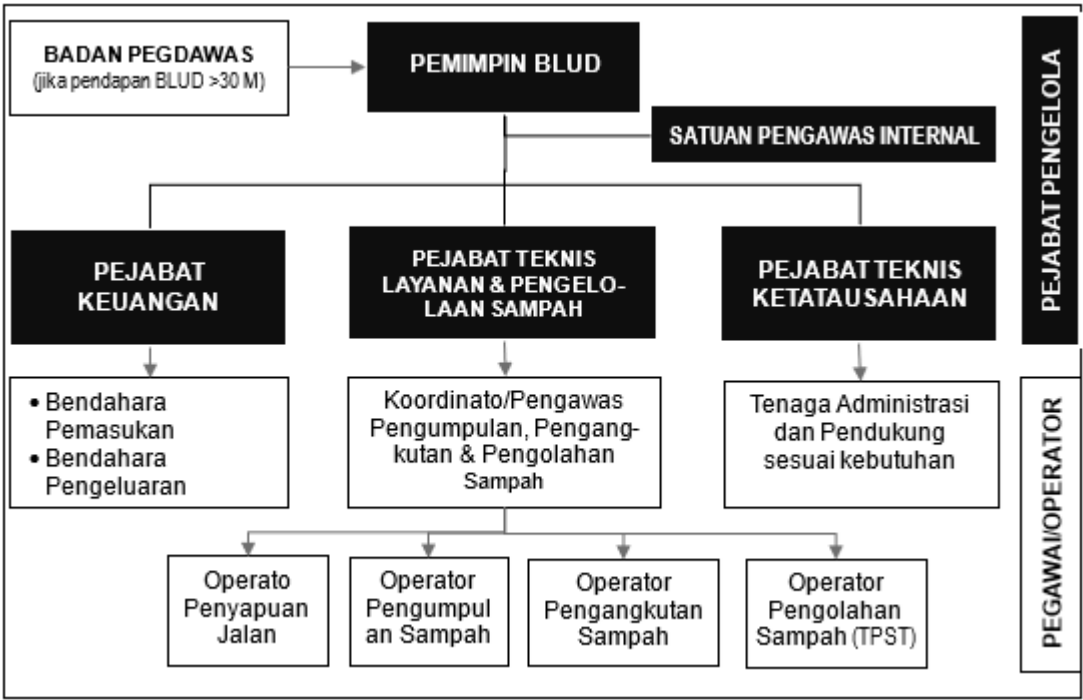
Gambar 2.3 Skenario Pelaksanaan Bisnis



Gambar 2.4 Offtaker Energi Dan Industri Daur Ulang Sampah An-Organik Yang Terdata S.D Desember 2025

2.1.4 Struktur Organisasi BLUD

Untuk menjalankan skenario pengelolaan sampah dengan menjalankan fungsi BLUD dengan menjalankan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia strukur organisasi UPTD disesuaikan dengan struktur organsasi BLUD mengacu pada Permendagri no 79 tahun 2018 sebagai berikut:



Gambar 2.5 Struktur Organisasi BLUD

Tugas dan fungsi pejabat pengelola BLUD berdasarkan Permendagri nomor 79 tahun 2018 dan disesuaikan dengan kebutuhan BLUD Pengelolaan Sampah wilayah II dalam menjalankan bisnisnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Tugas Dan Tanggungjawab Pejabat Pengelola BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II Kabupaten Bandung

JABATAN	TANGGUNGJAWAB DAN URAIAN TUGAS
Pemimpin (Pimpinan) BLUD	Tanggungjawab Bertanggungjawab dalam pencapaian kinerja layanan Pengelolaan Sampah sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis dan rencana bisnis dan anggaran.
	Uraian Tugas 1. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas; 2. Merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah; 3. Menyusun rencana strategis; 4. Menyusun RBA; 5. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan; 6. Menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; 7. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada daerah; 8. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannyaMemimpin; dan 9. mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas.
Pejabat (Manajer) Keuangan	Tanggungjawab Bertanggungjawab terhadap pencapaian kinerja keuangan dealam pengelolaan pendapatan dari jasa layanan dan sumber pendapatan laian yang efektif menuju cost recovery operasional
	Uraian Tugas 1. Merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan; 2. Mengkoordinasikan penyusunan RBA; 3. Menyiapkan DPA; 4. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja; 5. Menyelenggarakan pengelolaan kas;

JABATAN	TANGGUNGJAWAB DAN URAIAN TUGAS
	6. Melakukan pengelolaan utang piutang dan investasi; 7. Menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya; 8. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; 9. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan 10. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
Pejabat (Manajer) Teknis Pengelolaan Sampah	Tanggungjawab Bertanggungjawab dalam pencapaian kinerja teknis dalam rangka penanganan dan pengurangan sampah di wilayah layanan UPTD BLUD PP Kabupaten Bandung
	Uraian Tugas 1. Menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; 2. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan rba; 3. Memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan 4. Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
Pejabat Teknis Ketatausahaan dan administrasi	Tanggungjawab Bertanggungjawab memberikan dukungan terhadap fungsi manajemen keuangan, manajemen teknis Pengelolaan Sampah dan operasi kelembagaan BLUD Kabupaten Bandung
	Uraian Tugas 1. Melaksanakan tugas pekerjaan ketatausahaan dalam mendukung kelancaran operasi Pengelolaan Sampah meliputi: a. Dukungan sarana; dan b. Dukungan sumber daya. 2. Melaksanakan tugas pekerjaan administrasi dalam mendukung kelancaran tugas pekerjaan teknis pengelolaan persamaan dan pekerjaan teknis pengelolaan keuangan; 3. Melaksanakan pekerjaan Pengelolaan aset/sarana; 4. Pengelolaan SDM dalam menjalankan tugas sesuai dengan SOP.
Satuan Pengawas Internal (SPI)	Tugas Utama Satuan Pengawas Internal BLUD adalah: 1. Pengamanan harta kekayaan; 2. Menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;

JABATAN	TANGGUNGJAWAB DAN URAIAN TUGAS
	3. Menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan 4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam 5. Penerapan praktek bisnis yang sehat Fungsi Dalam melaksanakan tugasnya satuan pengawas internal menjalankan fungsi sebagai berikut: 1. Membantu Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah dalam melakukan pengawasan internal BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II Kabupaten Bandung. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencapai sasaran BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II Kabupaten Bandung secara ekonomis, efisien, dan efektif. 2. Membantu efektivitas penerapan tata kelola di BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II Kabupaten Bandung. 3. Menangani permasalahan yang berkaitan dengan indikasi terjadinya KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) yang menimbulkan kerugian BLUD Pengelolaan Sampah sama dengan unit kerja terkait.
Pegawai BLUD	1. Pegawai BLUD menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD. 2. Pegawai BLUD berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Pegawai BLUD dapat diangkat dari tenaga profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan. 4. Pegawai BLUD dari tenaga profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap dan dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Pengangkatan dan penempatan pegawai BLUD berdasarkan kompetensi yaitu pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan sesuai dengan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.

2.2 Sumber Daya UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II

Sumber daya UPTD Pengelolaan Sampah wilayah II meliputi sumber daya sarana/teknologi, keuangan/anggaran dan Sumber Daya Manusia dengan rincian sebagai berikut:

2.2.1 Sumber Daya Sarana

Sumber daya sarana yang dioperasikan UPTD dalam pengelolaan sampah di wilayah II meliputi sebagai berikut:

- 1. Sarana pengelolaan sampah di hulu:
 - 1) Sarana pewadahan sampah (tong sampah)
 - 2) Sarana pengambilan sampah/gerobak sampah
 - 3) Tempah Pembuangan Sampah Sementara (TPS/depo sampah)
 - a. Jumlah terbangun/tersedia
 - b. Jumlah berfungsi
 - 4) Bank Sampah Unit dan TPS3R

Kecamatan	Desa			Bank Sampah Unit (BSU)			TPS3R			Komunitas Maggot
	Ada BSU/TPS3R	Tidak Ada BSU/TPS3R	Jumlah	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah	
Banjaran	10	1	11	23	8	31	2	6	8	2
Cangkuang	7	0	7	2	8	10	4	1	5	1
Cimaung	10	0	10	6	11	17	0	8	8	0
Margahayu	5	0	5	1	10	11	3	2	5	0
Margaasih	4	2	6	11	1	12	0	2	2	4
Pangalengan	13	0	13	13	19	32	3	6	9	1
Jumlah	49	3	52	56	57	113	12	25	37	8

Dari 52 desa yang menjadi wilayah pelayanan UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II:

- 3 desa tidak memiliki Bank Sampah Unit/TPS3R di wilayahnya
- Hanya 56 unit (49,56%) dari 113 Bank sampah unit yang aktif
- Hanya 12 unit TPS3R (32,43%) dari 37 TPS3R yang aktif
- Terdapat 8 komunitas magot di UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II

2. Sarana Pengangkutan Sampah

Tabel 2.7 Armada Pengangkutan Sampah

Armada Pengangkutan Sampah		
Jenis	Jumlah	Fungsi
Arm roll	12	Untuk mempermudah pengangkatan, pengangkutan dan penurunan bak sampah secara cepat dan efisien
Dump truck	13	Untuk mengangkut residu dari TPST ke Tempat Pemrosesan Akhir
Pick up	3	Untuk mengangkut sampah dalam skala ringan hingga menengah
Armada roda tiga	10	Untuk mengangkut sampah dari sumber sampah ke Tempat Pemrosesan

3. Sarana Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah

Tabel 2.8 Sarana Pengolahan Dan Pemrosesan Akhir Sampah

Sarana Pengolahan dan pemrosesan akhir sampah	
TPST (Oxbow Cicukang)	
• Alamat	Jalan Inspeksi Citarum, Desa Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung
• Tahun dibangun	2022
• Volume Kapasitas Pengolahan	20 ton (eksisiting) akan dikembangkan menjadi 80 ton
 Lokasi TPSTCicukang di Kec. Margaasih	
TPA (Sarimukti)	
• Alamat	Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat
• Batas administrasi	• Utara : RPH Cipeundeuy, Jl Rajamandala-Cipeundeuy dan Desa Nanggaleng Kec. Cipeundeuy • Timur : RPH Cipeundeuy dan Desa Kertamukti • Selatan : RPH Cipatat dan Kp. Cipicung • Barat : RPH Cipatat dan Desa Nanggaleng
• Tahun dibangun	2006 (mulai beroperasi)
• Luas lahan	25,2 Ha Terdiri dari 21,5 Ha Tanah Perhutani dan 4 Ha Tanah Pemkot Bandung dan Cimahi Luas Efektif Landfill : 60 % dari total luas Luas Untuk Fasilitas Sarana Dan Prasarana : 40 % dari total luas
• Daya Tampung Total	1.962.637 m ³

 lokasi TPA Sarimukti	
Jenis sarana pendukung	
• Fasilitas operasional & administrasi	- Kantor pengelola - Pos pencatatan - Pintu gerbang dan pagar - Papan nama & area penerimaan
• Fasilitas pengolahan pendukung	- Area komposting - Bangunan komposting - Kolam stabilisasi - Reservoir air bersih
• Fasilitas transportasi & alat	- Jembatan timbang - Garasi alat berat - Tempat pengisian bahan bakar - Alat berat (bulldozer, excavator, wheel loader)
• Infrastruktur pendukung lingkungan	- Sumur pantau - Drainase & Instalasi Pengolah Lindi - Ventilasi gas - Jalur hijau (buffer zone) - Pengendalian vektor
• Fasilitas akses & utilitas	- Jalan operasi dan jalan internal TPA - Area manuver kendaraan - Akses jalan menuju lokasi TPA

4. Kantor Operasi

Tabel 2.9 Kantor Operasi

Alamat	Jalan Inspeksi Citarum, Desa Mekarrahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung
Status kepemilikan	Pemerintah Kabupaten Bandung dengan luas 1,4 Ha
Foto	

2.2.2 Sumber Daya Keuangan

Pada Tahun 2025 Biaya operasi UPTD Wilayah II dan UPTD Pengelolaan Sampah lainnya bergabung anggaran Bidang Pengelolaan Sampah pada Anggaran Program Pengelolaan Persampahan (terdiri dari 1 kegiatan dan 6 subkegiatan) yang bersumber dari APBD tahun 2025, dengan total anggaran sebesar Rp. 58.611.873.982 dan Realisasi sebesar Rp. 52.764.665.920 atau 90,16%. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.10 Anggaran Pengelolaan Sampah Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu Anggaran	Total Realisasi	Sisa Anggaran	Pagu	Realisasi Anggaran
1	Program Pengelolaan Persampahan		58.611.873.982,00	52.847.208.062,00	5.764.665.920,00		90,16%
1	Kegiatan Pengelolaan Sampah		58.611.873.982,00	52.847.208.062,00	5.764.665.920,00		90,16%
	1	Pengurangan Sampah melalui Pendaauran Ulang Sampah	611.990.572	485.200.200	126.790.372		79,28%
	2	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	538.125.730	534.241.506	3,884,224		99,28%
	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	18.610.222.019	14.239.720.712	4.370.501.307		76,52%
	4	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah	15,000,000	14,884,800	115,200		99.23%
	5	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	23,625,000	23,584,800	40,200		99.83%
	6	Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	38.812.910.661	37.549.576.044	1.263.334.617		96,75%

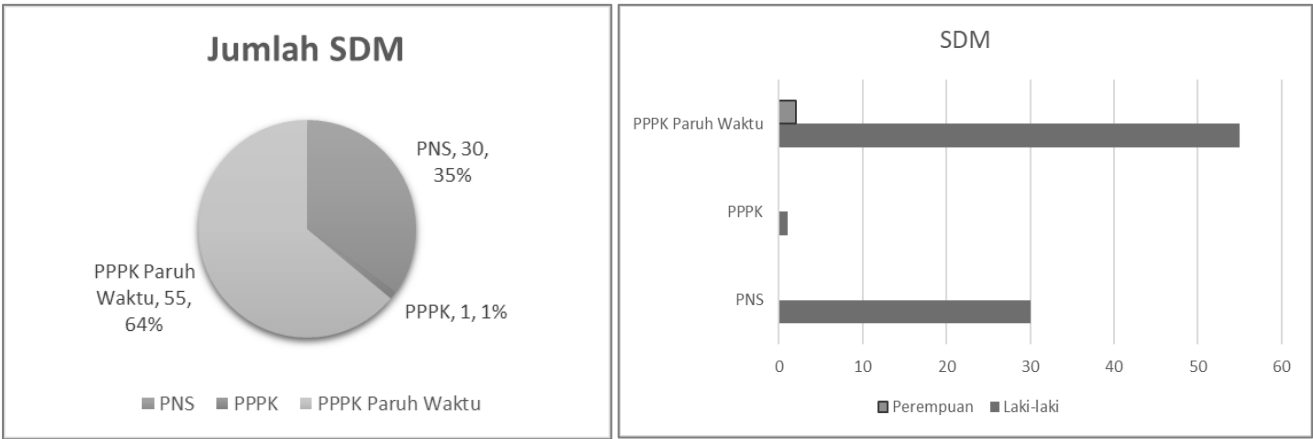
Biaya operasi UPTD Pengelolaan sampah terdapat pada Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (untuk operasi pengangkutan sampah) dan Sub Kegiatan Pengurangan Sampah Melalui Pendaauran Ulang Sampah (untuk operasi TPST Oxbow Cicukang). Total alokasi anggaran untuk operasi UPT Pengelolaan Sampah Wilayah II adalah Rp. 5.401.795.100,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.169.765.000,00 atau sebesar 95,70%.

2.2.3 Sumber Daya Manusia

UPTD Pengelolaan Sampah wilayah II didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 88 Orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.11 Jumlah Sumber Daya Manusia UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II Kabupaten Bandung

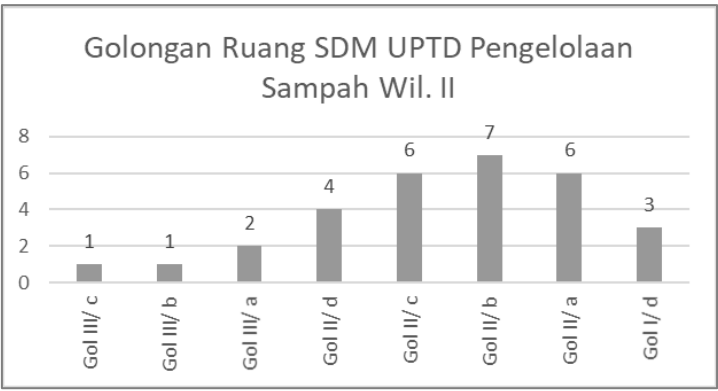
No	Sumber Daya Manusia (SDM)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	30	-	30
2	PPPK	1	-	1
3	PPPK Paruh Waktu	55	2	57
Jumlah		86	2	88



Berdasarkan golongan, sebagian besar golongan berada pada tingkat golongan II/a, II/b dan II/c.

Tabel 2.12 Golongan Ruang SDM

Tingkat Golongan	L	P	Jumlah
Gol III/ c	1	0	1
Gol III/ b	1	0	1
Gol III/ a	2	0	2
Gol II/ d	4	0	4
Gol II/ c	6	0	6
Gol II/ b	7	0	7
Gol II/ a	6	0	6
Gol I/ d	3	0	3
JUMLAH	30	0	30



Gambar 2.7 Golongan Ruang

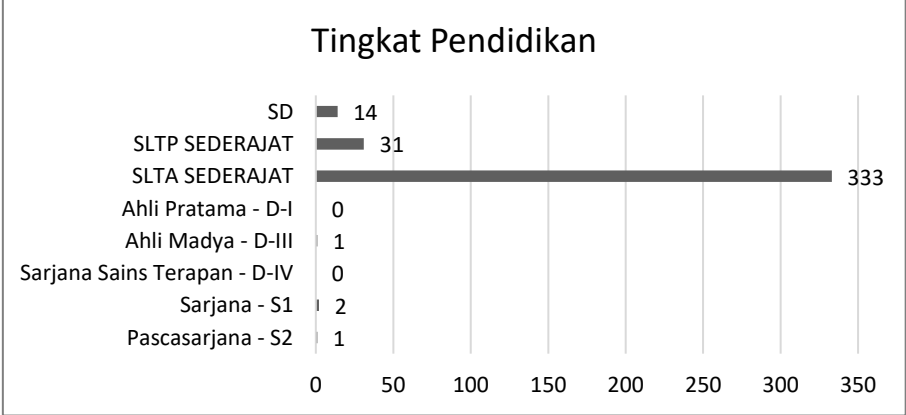
Formasi	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
Eselon II.b	0	0	0
Eselon III.a	0	0	0
Eselon III.b	0	0	0
Eselon IV.a	1	0	1
Eselon IV.b	1	0	1
Pelaksana	29	0	29
JFT	0	0	0
Pegawai PPPK PW	55	2	57
Jumlah	86	2	88

Tabel 2.13 Formasi SDM

Sebagian besar SDM ASN UPTD Pengelolaan Sampah wilayah II berpendidikan sarjana dan SLTA, sedangkan P3K Paruh Waktu didominasi oleh pendidikan SMP dan SLTA. Sedangkan berdasarkan penggolongan generasi, ASN di DLH Kabupaten Bandung didominasi oleh generasi X dan Non ASN nya didominasi oleh generasi Y (milenial). Tabel 2.14 dan Gambar 2.8 menunjukkan Tingkat pendidikan SDM DLH Kab. Bandung, sedangkan Tabel 2.15 Dan Gambar 2.9 menunjukkan penggolongan generasi pada pegawai DLH Kab. Bandung.

Tabel 2.14 Sumber Daya Manusia (SDM) UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II

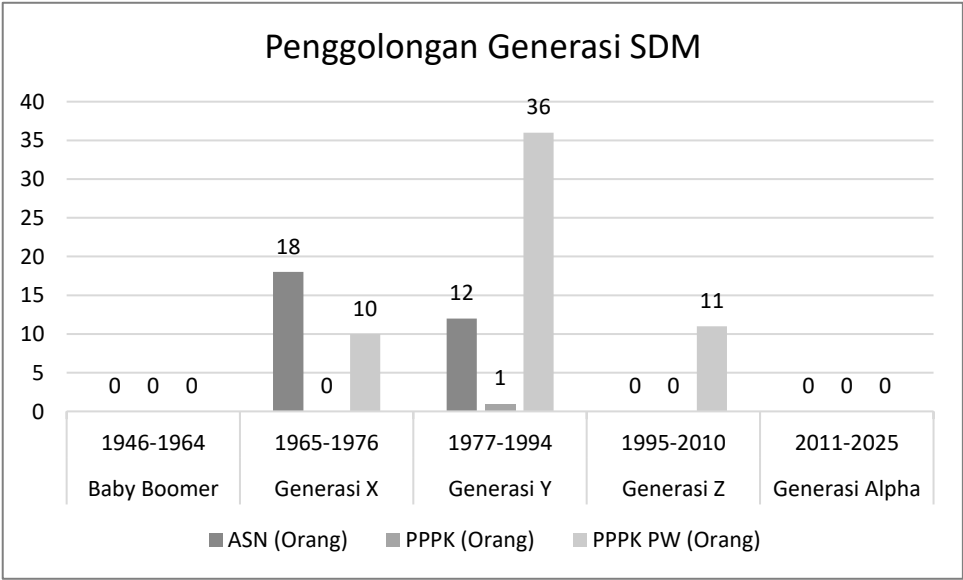
Tingkat Pendidikan	Pegawai Negeri Sipil (orang)			Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu (orang)			Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) (orang)		
	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
Pascasarjana - S2	1	-	1	-	-	0	-	-	0
Sarjana - S1	1	-	1	-	1	1	-	-	0
Sarjana Sains Terapan - D-IV	-	-	0	-	-	0	-	-	0
Ahli Madya - D-III	-	-	0	-	-	0	1	-	1
Ahli Pratama - D-I	-	-	0	-	-	0	-	-	0
SLTA SEDERAJAT	11	-	11	27	1	28	-	-	0
SLTP SEDERAJAT	8	-	8	23	-	23	-	-	0
SD	9	-	9	5	-	5	-	-	0
Jumlah	30	-	30	55	2	57	1	0	1



Gambar 2.8 Tingkat Pendidikan pada SDM UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II

Tabel 2.15 Penggolongan Generasi SDM di UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II

Generasi	Tahun Lahir	ASN (orang)			PPPK (orang)			PPPK PW (orang)		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Baby Boomer	1946-1964	-	-	0	-	-	0	-	-	0
Generasi X	1965-1976	18	-	18	-	-	0	10	-	10
Generasi Y	1977-1994	12	-	12	1	-	1	35	1	36
Generasi Z	1995-2010	-	-	0	-	-	0	10	1	11
Generasi Alpha	2011-2025	-	-	0	-	-	0	-	-	0
Jumlah		30	-	30	-	-	1	56	2	57



Gambar 2.9 Penggolongan Generasi SDM

Tabel 2.16 Ketenagakerjaan di BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II

No	Jenis Tenaga	Jumlah (orang)	Status	Standar Kebutuhan (orang)	Perhitungan Analisis Beban Kerja (orang)	Kekurangan (orang)
1	Kepala UPTD	1	PNS	1	1	0
2	Kasubag Tata Usaha	1	PNS	1	1	0
3	Penata Layanan Operasional	1	PPPK PW	4	4	3
4	Pengelola Layanan Operasional	2	1 PNS dan 1 PPPK	2	2	0
5	Pengolah Data dan Informasi	0	-	2	2	2
6	Operator Layanan	10	PNS	10	10	0

No	Jenis Tenaga	Jumlah (orang)	Status	Standar Kebutu han (orang)	Perhitungan Analisis Beban Kerja (orang)	Kekurang an (orang)
	Operasional					
7	Pengadministrasi Perkantoran	1	PNS	1	1	0
8	Operator Layanan Operasional (Pengemudi)	15	PNS	15	15	0
9	Operator Layanan Operasional (Awak Armada)	29	1 PNS dan 28 PPPK PW	29	29	0
10	Pengelola Umum Operasional	28	PPPK PW	28	28	0
Jumlah		88		93	93	5

2.3 Kinerja Pelayanan UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II DLH Kabupaten Bandung

UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II DLH Kabupaten Bandung secara resmi dibentuk dan ditetapkan pada tahun 2025 berdasarkan Peraturan Bupati Bandung No 346 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 68 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Kinerja pelayanan UPTD Pengelolaan Sampah di dasarkan pada capaian kinerja pengelolaan sampah di tingkat hulu dan tingkat hilir pada tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 2.17 Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Di Tingkat Hulu Dan Tingkat Hilir Pada Tahun 2025

URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	Ket
1. Pengelolaan Sampah di tingkat hulu	1. Jumlah Desa/Kelurahan yang terjangkau layanan persampahan	52 Desa	36 Desa	69,23%	• Data Pelayanan Truk Sampah DLH terdiri dari 29 Desa 4 Kecamatan (Cangkuang, Banjaran, Margaasih dan Margahayu) dan 1 Desa dari Kecamatan Cimaung • Data fasilitas Bank Sampah, TPS3R, dan Penggiat Maggot dari 6 Desa Kecamatan Cimaung dan Pangalengan
	2. Jumlah Rumah Tangga mendapatkan akses layanan pengumpulan sampah	127.055 KK	Penanganan : 73,34 ton/hari setara dengan 39.011 KK Pengurangan : 24,6 ton/hari setara dengan 13.085 KK Total : 52.096 KK	41,00%	- Penanganan dari jumlah sampah ke TPA bulan April sebesar 73,34 ton/hari - Pengurangan berasal dari jumlah KK terlayani dari kegiatan Bank Sampah, TPS3R, dan Penggiat Maggot sebesar 24,60 ton/hari
	3. Jumlah sampah terangkut ke TPA/TPST	89,05 ton/hari	73,34 ton/hari	82,36%	Target RISPS Pengangkutan Sampah ke TPA sebesar 16,24% ditambah 30 ton/hari dari fasilitas TPST
2. Pengelolaan Sampah di tingkat hilir	1. Jumlah sampah terolah di TPST	40 ton/hari	13,97 ton/hari	35%	• Berdasarkan Teknologi pengolahan yang akan dipasang • Realisasi Sampah Masuk TPST Tahun 2025

URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	Ket
	2. Jumlah pengurangan sampah	2 ton/hari	0 ton/hari	0%	Data sampah yang dikelola dengan teknologi mekanikal sesuai rencana pemasangan teknologi dengan Residu 62%, Bubur Organik 25%, 2% Bernilai Ekonomis, 5% Produk RDF, dan 6% Pyrolysis
	3. Jumlah produk hasil pengolahan sampah (RDF)	2 ton/hari	0 ton/hari	0%	Data Pengolahan TPST Puspa Jelesong menjadi RDF : 5%
	4. Jumlah residu sampah dilakukan pemrosesan akhir di TPA	24,8 ton/hari	13,97 ton/hari	56%	Data Pengolahan TPST Puspa Jelesong menjadi Residu 62%

2.4 Kinerja Keuangan

Berdasarkan pemisahan anggaran pada Program Pengelolaan Sampah Tahun 2025, kinerja keuangan UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II berdasarkan realisasi anggaran pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.18 Realisasi Anggaran Pada Tahun 2025

No	Kode Program	Nama Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Parsial VI	Jumlah Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi Anggaran
I.I. I	2.11.11.2.01.0 020	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (DAU)	5.401.795.100,00	5.169.765.000,00	232.030.100,00	95,70%
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		5.401.795.100,00	5.169.765.000,00	232.030.100,00	95,70%
	<i>Belanja Barang Pakai Habis</i>		2.030.535.100,00	2.030.000.000,00	10.518.173,00	99,97%
	5.1.02.01.01.0 004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (DAU)	1.551.000.000,00	1.550.000.000,00	395.900,00	99,94%
	5.1.02.01.01.0 013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	349.125.000,00	348.000.000,00	2.099.506,00	99,68%
	5.1.02.01.01.0 036	Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kanto-Alat Bahanuntuk Kegiatan Kantor Lainnya	130.410.100,00	130.000.000,00	47.109,00	99,69%
	<i>Belanja Jasa Kantor</i>		1.631.250.000,00	1.406.225.000,00	231.505.000,00	86,21%
	5.1.02.02.01.0 028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	225.000.000,00	225.000,00	224.775.000,00	0,10%
	5.1.02.02.01.0 051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.406.250.000,00	1.406.000.000,00	250.000,00	99,98%

No	Kode Program	Nama Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Parsial VI	Jumlah Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi Anggaran
	<i>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</i>		<i>1.177.510.000,00</i>	<i>1.173.540.000,00</i>	<i>3.970.000,00</i>	<i>99,66%</i>
	5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	54.000.000,00	53.700.000,00	300.000,00	99,44%
	5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	146.760.000,00	144.300.000,00	2.460.000,00	98,32%
	5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	927.750.000,00	927.000.000,00	750.000,00	99,92%
	5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	49.000.000,00	48.540.000,00	460.000,00	99,06%
	<i>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</i>		<i>562.500.000,00</i>	<i>560.000.000,00</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>99,56%</i>
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	562.500.000,00	554.000.000,00	8.500.000,00	98,49%
I.I. II	2.11.11.2.01.0019	Sub Kegiatan Pengurangan Sampah Melalui Pendaauran Ulang Sampah (DAU)	611.990.572,00	485.200.200,00	126.790.372,00	79,28%
	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>		<i>541.292.172,00</i>	<i>470.139.000,00</i>	<i>71.153.172,00</i>	<i>86,85%</i>
	<i>Belanja Barang Pakai Habis</i>		<i>213.678.372,00</i>	<i>152.589.000,00</i>	<i>61.089.372,00</i>	<i>71,41%</i>

No	Kode Program	Nama Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Parsial VI	Jumlah Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi Anggaran
	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	15.450.000,00	-	15.450.000,00	0,00%
	5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-bahan/Bibit Tanaman	800.000,00	800.000,00	-	100,00%
	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	51.775.400,00	45.917.600,00	5.857.800,00	88,69%
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Bahan Cetak)	13.064.600,00	13.062.200,00	2.400,00	99,98%
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	50.172,00	-	50.172,00	0,00%
	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	20.561.400,00	20.561.400,00	-	100,00%
	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	40.146.800,00	40.117.800,00	29.000,00	99,93%
	5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	39.700.000,00	-	39.700.000,00	0,00%
	5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	28.330.000,00	28.330.000,00	-	100,00%
	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.800.000,00	3.800.000,00	-	100,00%

No	Kode Program	Nama Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Parsial VI	Jumlah Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi Anggaran
	<i>Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi</i>		6.850.000,00	6.850.000,00	-	100,00%
	5.1.02.01.04.0103	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	6.850.000,00	6.850.000,00	-	100,00%
	<i>Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</i>		9.913.800,00	-	9.913.800,00	0,00%
	5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	9.913.800,00	-	9.913.800,00	0,00%
	<i>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</i>		309.000.000,00	309.000.000,00	-	100,00%
	5.1.02.03.02.0011	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	294.000.000,00	294.000.000,00	-	100,00%
	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00%
	<i>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</i>		1.850.000,00	1.700.000,00	150.000,00	91,89%
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	150.000,00	-	150.000,00	0,00%
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.700.000,00	1.700.000,00	-	100,00%
	<i>Belanja Modal</i>		70.698.400,00	15.061.200,00	55.637.200,00	21,30%

No	Kode Program	Nama Program/Kegiatan & Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Parsial VI	Jumlah Realisasi	Sisa Anggaran	% Realisasi Anggaran
	<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</i>		70.698.400,00	15.061.200,00	55.637.200,00	21,30%
	<i>Belanja Modal Alat Bantu</i>		22.660.000,00	-	22.660.000,00	0,00%
	5.2.02.01.03.006	Belanja Modal Mesin Bor	22.660.000,00	-	22.660.000,00	0,00%
	<i>Belanja Modal Alat Kantor</i>		10.385.400,00	-	10.385.400,00	0,00%
	5.2.02.05.01.004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	10.385.400,00	-	10.385.400,00	0,00%
	<i>Belanja Modal Alat Rumah Tangga</i>		37.653.000,00	15.061.200,00	22.591.800,00	40,00%
	5.2.02.05.02.003	Belanja Modal Alat Pembersih	37.653.000,00	15.061.200,00	22.591.800,00	40,00%

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Pelaku

Identifikasi pelaku merupakan langkah krusial dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BLUD Persampahan untuk memetakan peran, wewenang, dan tanggung jawab setiap pemangku kepentingan. Proses ini bertujuan memastikan bahwa seluruh aktor, mulai dari tingkat hulu, pengambil kebijakan di pemerintah daerah hingga operator teknis di lapangan dan hulu, memiliki pemahaman yang selaras mengenai target kinerja pelayanan sampah. Dengan identifikasi yang tepat, organisasi dapat memitigasi risiko tumpang tindih kewenangan serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam ekosistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Melalui pemetaan pelaku yang komprehensif, BLUD Persampahan dapat membangun komitmen bersama untuk mencapai kemandirian fiskal sekaligus meningkatkan kualitas kebersihan lingkungan di wilayah tersebut.

Tabel 3.1 Para Pihak Dan Perannya dalam Penyelenggaraan BLUD

PERAN	PELAKU	PERAN YANG DIJALANKAN
Penanganan di Hulu	Pemerintah Desa/ Kelurahan	Sosialisasi kepada setiap Masyarakat dalam hal pemilahan sampah dan Larangan membuang sampah sembarangan
Sosialisasi/promosi/edukasi masyarakat	Ketua RT/RW	Sosialisasi kepada setiap rumah tangga dalam hal pemilahan sampah dan larangan membuang sampah sembarangan
Memastikan setiap rumah tangga memilah sampah	Ketua RT/RW, Karang Taruna, PKK, Majelis Taklim, Pengurus Bank Sampah	Membantu dan memotivasi warga untuk selalu melakukan pemilahan sampah
Layanan pengumpulan sampah	Bank Sampah, TPS3R, Pemulung, Pengepul/Lapak	Pengumpulan sampah
Memastikan TPS3R berfungsi dengan optimal	Dinas LH, Pengelola Kawasan, Lurah/RW/RT, Pengelola TPS3R	Membantu dan memotivasi pengelola TPS3R untuk terus

PERAN	PELAKU	PERAN YANG DIJALANKAN
		berfungsi secara optimal
Pengangkutan sampah yang efektif ke tempat pengolahan sampah	DLH, Pihak ketiga/swasta,	Mengoperasikan armada truk sampah (seperti <i>compactor truck</i> , <i>dumptruck</i>) untuk mengangkut sampah dari TPS3R ke TPST.
Memastikan masyarakat membayar retribusi dan jasa layanan sampah	DLH, Bapenda, Pengelola Kawasan Mandiri, Lurah/RW/RT	Melakukan penarikan retribusi sesuai SOP
Pengoperasian sarana pengolahan sampah (TPST) yang optimal	UPTD/BLUD pengelola sampah, Koperasi/KSM	1. Melakukan Penerimaan dan pemilahan sampah (preprocessing) 2. Melakukan transformasi energi dan material 3. Pengendalian pencemaran 4. Menangani residu 5. Pemeliharaan sarana
Pengoperasian TPA yang optimal	DLH Prov. Jabar (Pengelola TPA Regional)	Memastikan TPA beroperasi sesuai SOP dan target
Perencanaan pengelolaan sampah yang terukur	DLH/UPTD/BLUD	Melakukan perencanaan pengelolaan sampah sesuai kapasitas sarana yang dimiliki
Dukungan kebijakan/peraturan yang memungkinkan peran dan dukungan masyarakat yang optimal	DLH	Merumuskan kebijakan/peraturan yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah utamanya dalam hal pemilahan

PERAN	PELAKU	PERAN YANG DIJALANKAN
Monitoring tingkat penanganan dan pengurangan sampah yang efektif	DLH/UPTD/BLUD, Kades/Lurah/RW/R T	Melakukan monitoring secara berkala dan memberikan rekomendasi yang tepat
Dukungan anggaran dari APBD yang memadai	Kepala Daerah	Memastikan anggaran APBD memadai untuk membiayai operasionalisasi pengelolaan sampah
Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai	DLH dan Mitra	Memastikan sarana dan prasarana pengelolaan sampah terpenuhi dan layak pakai
Pemanfaatan dan penjualan produk pengolahan sampah	Pelaku Industri semen, industri tekstil, pertanian, peternakan	Memastikan produk hasil pengelolaan dapat diterima pasar secara berkelanjutan

Berdasarkan analisis pelaku pengelolaan sampah diatas, dalam rangka pengelolaan sampah oleh BLUD Kabupaten Bandung diperlukan dukungan pelaku dengan uraian peran sebagai berikut;

Tabel 3.2 Peran Seluruh Stakeholder Dalam Penyelenggaraan BLUD

NAMA PIHAK YANG DILIBATKAN	PERAN YANG DIHARAPKAN
Pengelolaan di tingkat Hulu	
1. Ketua RT	Fasilitator
2. Pemerintah Desa/Kelurahan	Pembina dan motivator
3. Tim Penggerak PKK	Fasilitator
4. Bank Sampah	Penggerak pemilahan sampah dan ekonomi sirkuler
Pengelolaan di tingkat Hilir	
1. UPTD Pengelolaan Sampah	Komandan operasional pengelolaan sampah
2. Dinas Lingkungan Hidup	Pembina utama
3. Dinas Kesehatan	Membantu dalam perubahan perilaku pengelolan sampah di tingkat rumah tangga (pilar ke 4 STBM/Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
4. Dinas Pariwisata	Fasilitator sarana dan prasarana pengelolaan sampah di tempat wisata

NAMA PIHAK YANG DILIBATKAN	PERAN YANG DIHARAPKAN
5. Bagian Pemerintahan – Setda 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Koordinator antar Perangkat Daerah Pembinaan, Fasilitator regulasi Kecamatan/Desa terkait pengelolaan sampah
7. <i>Offtaker</i>	Penjamin kepastian pasar produk pengelolaan sampah

3.2 Identifikasi Masalah

3.2.1 Identifikasi Faktor Strategis Internal

Berdasarkan identifikasi faktor strategis internal dari kekuatan dan kelemahan UPTD Pengelolaan Sampah wilayah II DLH Kabupaten Bandung diperoleh gambaran sebagai berikut:

1. Pelayanan

- a. Tingkat pelayanan sebelumnya pada pengangkutan sampah sebesar 26,93% dari jumlah timbulan sampah seluruhnya
- b. Terdapat pelayanan baru yang sebelumnya hanya pengangkutan saja, akan ditambah menjadi pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan
- c. Telah dilakukannya penerimaan retribusi
- d. Jumlah sarana prasarana pengangkutan belum mencukupi
- e. Perlu ditingkatkannya sosialisasi pelayanan persampahan
- f. Keaktifan bank sampah dan TPS 3R yang masih fluktuaktif : dari 113 Bank Sampah Unit (BSU), yang aktif hanya 57 unit (49,6%), sedangkan dari 37 unit TPS3R yang aktif hanya 12 unit (32,4%).

Kecamatan	Desa			BSU			TPS3R			Komunitas Magot
	Ada BSU/TPS3R	Tidak Ada BSU/TPS3R	Jumlah	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah	
Banjaran	10	1	11	23	8	31	2	6	8	2
Cangkuang	7	0	7	2	8	10	4	1	5	1
Cimaung	10	0	10	6	11	17	0	8	8	0
Margahayu	5	0	5	1	10	11	3	2	5	0
Margaasih	4	2	6	11	1	12	0	2	2	4
Pangalengan	13	0	13	13	19	32	3	6	9	1
Jumlah	49	3	52	56	57	113	12	25	37	8

- g. TPST Oxbow Cicukang akan dijadikan pusat pengelolaan sampah pada UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II untuk mengurangi sampah yang terangkut ke TPA
- h. TPST Oxbow Cicukang sedang melaksanakan uji coba operasi dan menghasilkan *Refuse Derived Fuel* (RDF) sebagai bahan bakar alternatif hasil pengelolaan sampah
- i. Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah di TPST Oxbow Cicukang menjadi 70 ton/hari (40 ton/hari merupakan bentuk dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Program ISWMP (*Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities Project*) dan 30 ton/hari dari APBD Kabupaten Bandung.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. SDM tersedia dalam berbagai jenis pekerjaan teknis dan administrasi, namun SDM pengelola mesin RDF masih terbatas
- b. Tingkat pendidikan SDM masih rendah (SD =16%, SMP=35% dan SMA=44,32%)

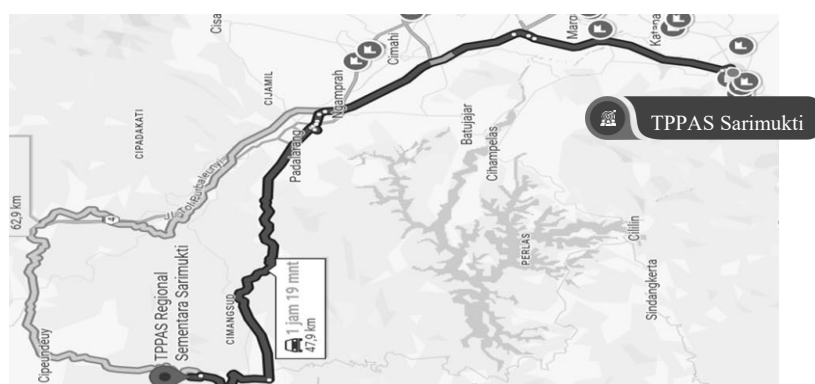
- c. SDM yang lulusan akuntansi tidak ada, namun ada bendahara UPT yang berpengalaman dibidang keuangan
 - d. Adanya Kader Bandung Bedas Bersih Sampah (B3S) pada masing-masing kecamatan
3. Keuangan
- a. Menggunakan sistem SIPD
 - b. Berkas SPJ dilakukan secara manual karena harus ada salinan fisik
 - c. Masih terdapat pembayaran retribusi dilakukan secara manual
 - d. Keterbatasan anggaran dalam pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta edukasi pengelolaan sampah
 - e. Mahalnya biaya Biaya pengangkutan ke TPA Sarimukti, yaitu Rp 72.500/ton sampah (untuk pembayaran Kompensasi Jasa Pelayanan/KJP, Kompensasi Dampak Negatif/KDN dan KDN arus balik ritase)
 - f. Produksi RDF dibiayai dengan APBD
4. Sarana dan Prasarana
- a. Keterbatasan armada pengangkutan sampah, baik dari sisi jumlah maupun kondisi armada
 - b. Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia saat ini perlu adanya perbaikan
 - c. Adanya pembatasan kuota sampah ke TPA
 - d. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, berupa armada pengangkutan dan fasilitas TPS 3R yang belum memadai

3.2.2 Identifikasi Faktor Strategis Eksternal

Berdasarkan faktor peluang dan ancaman eksternal UPTD Pengelolaan Sampah wilayah II DLH Kabupaten Bandung diperoleh gambaran sebagai berikut:

1. Kondisi Geografis

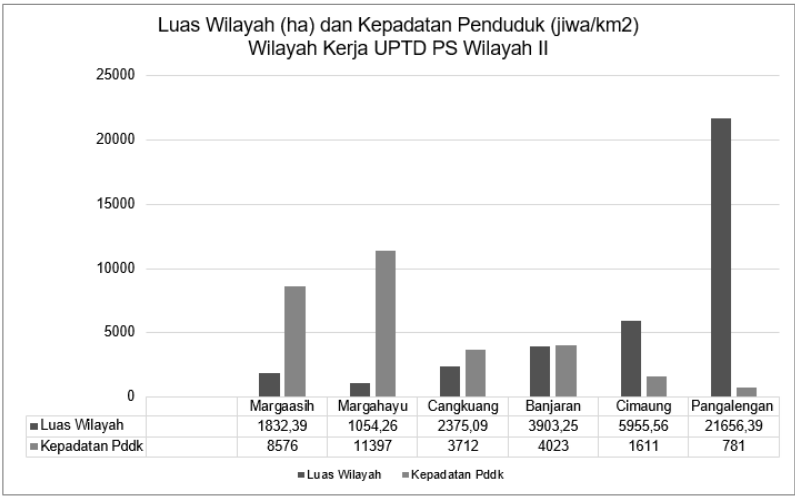
- a. Luasnya wilayah layanan UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II, yaitu 36.776,94Ha (21,13% dari luas Kabupaten Bandung, dengan topografi paling berbukit adalah Kecamatan Pangalengan dan Cimaung, transisi/perbukitan landai di Kecamatan Banjaran dan Cangkuang, serta relatif datar/perkotaan di wilayah Kecamatan Margahayu dan Margaasih.
- b. Jarak wilayah layanan ke TPA yang cukup jauh memerlukan biaya yang cukup besar untuk operasional (BBM, e-toll).



- c. Kecamatan Pangalengan merupakan daerah pariwisata yang berpotensi banyak menarik wisatawan yang berimplikasi pada timbunan sampah yang semakin besar dan jika tidak terolah maka akan menyebabkan permasalahan



- d. Terlalu padatnya penduduk di wilayah layanan, khususnya Kecamatan Margahayu merupakan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Bandung dengan besaran 11.397 orang/km², jika tidak terkelola dengan baik akan menyebabkan permasalahan



Sumber : RPJMD Thn 2025-2029 dan Kabupaten Bandung dalam Angka 2026

2. Karakteristik Penduduk

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Bandung khususnya penduduk yang termasuk wilayah II (Kecamatan Margaasih, Margahayu, Cangkuang, Banjaran, Cimaung dan Pangalengan) yang relatif besar merupakan potensi yang dapat diberdayakan dan dikembangkan untuk mewujudkan kota yang unggul dan berdaya saing
- b. Penduduk yang padat, jika layanan dasarnya belum optimal, maka akan menimbulkan permasalahan terkait sampah dan masalah sosial lainnya

3. Pesaing

- a. Tingginya biaya sewa kendaraan untuk menutupi kekurangan armada pengangkutan, untuk pengangkutan sampah dari wilayah pelayanan menuju fasilitas pengolahan atau pemrosesan akhir
- b. Pelayanan persampahan untuk sektor privat/pariwisata masih perlu ditingkatkan

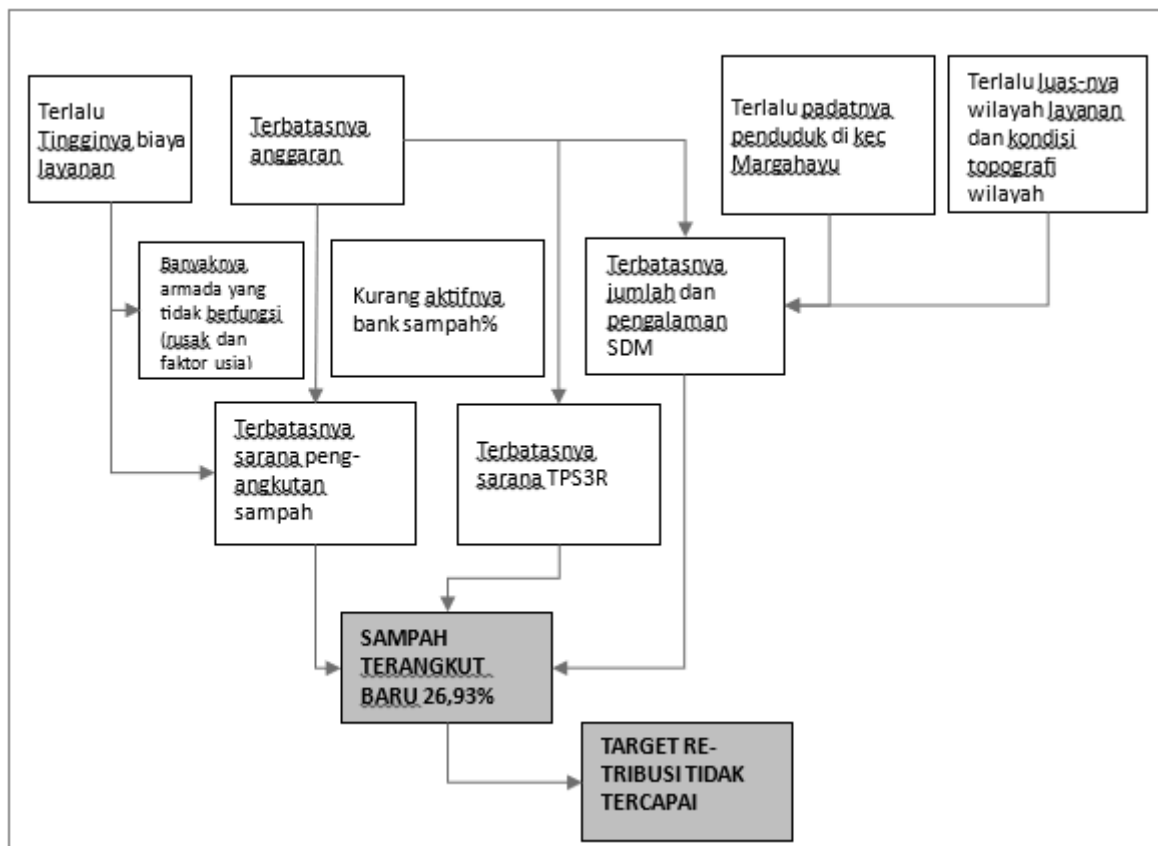
4. Regulasi

- a. Regulasi mengenai pengelolaan sampah sudah ada
- b. Regulasi mengenai UPTD Pengelolaan Sampah sudah ada
- c. Regulasi mengenai retribusi pelayanan sampah sudah ada

- d. Regulasi mengenai rencana induk sistem pengelolaan sampah sudah ada
- e. SOP pengelolaan sampah sudah ada namun belum lengkap
- f. Penerapan regulasi belum optimal
- g. Masih adanya masyarakat Kabupaten Bandung yang belum mengetahui dan memahami regulasi bidang pengelolaan sampah
- h. Penegakkan hukum terkait regulasi pengelolaan sampah terbatas SDM

3.2.3 Analisis Akar Masalah

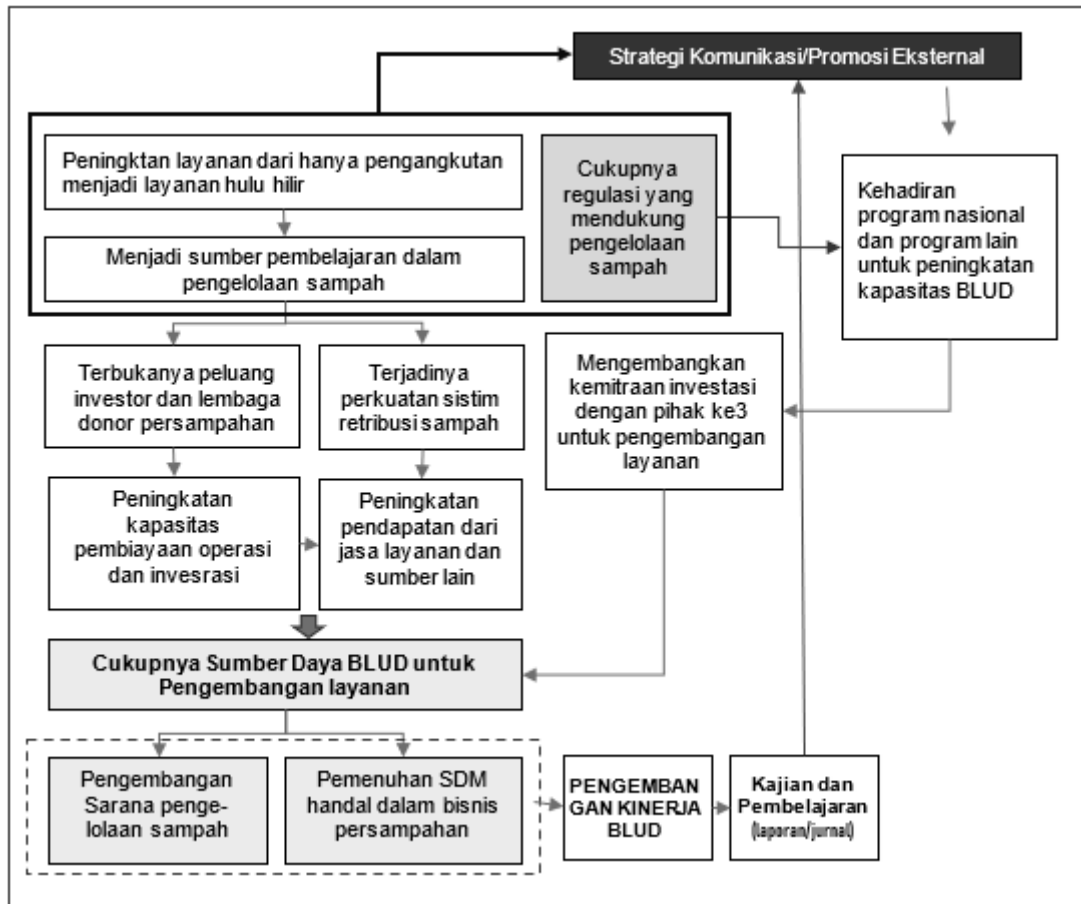
Analisis akar permasalahan berdasarkan kelemahan internal dan ancaman eksternal UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II dapat diperoleh akar permasalahan sebagai berikut.



Gambar 3.3 Analisis Akar Masalah UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II

3.2.4 Analisis Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah UPTD dalam pengelolaan sampah wilayah II berbasis kekuatan internal dan peluang eksternal dapat dipeoleh gambaran sebagai berikut:



Gambar 3.4 Analisis Pemecahan Masalah UPTD BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II

Analisis pemecahan masalah UPTD BLUD Pengelolaan Sampah wilayah II sebagaimana gambar 3.2 diatas dapat ditarik pointers sebagai berikut:

1. UPTD BLUD mengembangkan paket strategi komunikasi eksternal yang berisi”
 - a. dokumen *profie company BLUD* yang renstra BLUD dan gambaran daerah dampingan yang menarik untuk dikembangkan dan ditarik pembelajarannya dalam pengelolaan sampah
 - b. informasi tentang kebijakan dan peraturan yang telah tersedia yang mendukung terhadap pengembangan kinerja pengelolaan sampah
2. Menyampaikan paket informasi tersebut ke pihak-pihak yang relevan di kementerian, lembaga donor internasional dan investor
3. Pendokumentasian setiap evidence kegiatan yang bernilai promosi
4. Melakukan kajian pengalaman dan lessons learned (pembelajaran yang dipetik) dan mempublikasikannya ke dalam paket strategi komunikasi yang dilakukan secara periodik secara berkelanjutan.

3.3 Isu Strategis

Isu Strategis adalah permasalahan mendasar yang berimplikasi luas dalam pengelolaan sampah UPTD pengelolaan sampah wilayah ii di Kabupaten Bandung.

- Jika isu strategis ditangani maka akan memberikan nilai yang baik dan akan menyelesaikan serangkaian permasalahan yang melingkupinya
- Jika isu strategis tidak ditangani akan menambah permasalahan baru dan akan mengancam atau berisiko tidak tercapainya tujuan dan

sasaran dalam peningkatan kinerja pengelolaan sampah oleh UPTD BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II

Berdasarkan identifikasi faktor strategis internal dan eksternal, analisis akar masalah sebagaimana Gambar 3.1 dan analisis pemecahan masalah sebagaimana Gambar 3.2, UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II dalam Rencana Strategis periode 2026-2029 menetapkan isu strategis sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rencana Strategis Periode 2026-2029

LEVEL PENGELOLAAN SAMPAH	INDIKATOR	ISU STRATEGIS
1. Pengelolaan Sampah di Tingkat Hulu	Jumlah Rumah Tangga memilah sampah	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan pemilahan sampah
2. Pengumpulan dan pengangkutan sampah	Jumlah RT mendapat layanan pengumpulan sampah	Belum optimalnya layanan pengumpulan sampah di UPTD Wilayah II
3. Pengoperasian TPST	Tingkat efisiensi operasi TPST	Belum optimalnya pengoperasian TPST
4. Penanganan dan pengurangan sampah	Total timbulan sampah ditangani, Jumlah sampah dikurangi	Kinerja penanganan dan pengurangan sampah masih rendah

Tabel 3.4 Rasionalitas Isu Strategis Yang Dihadapi BLUD

No	Isu Strategis	Jika di Tangani		Jika Tidak ditangani		Instesitas • Luas • Sedang • Kasuistik
		Permasalahan apa yang langsung bisa diselesaikan	Kondisi apa saja yg akan dicapai	Permasalahan apa saja yang akan timbul	Akibat fatal yg akan terjadi	
1	Masih rendahnya kesadaran Masyarakat untuk melakukan kegiatan pemilahan sampah	Berkurangnya timbulan sampah yang diangkut ke TPST/TPA	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Masyarakat yang apatis terhadap sampah	Masyarakat tidak memiliki rasa tanggungjawab terhadap pengelolaan sampah	Luas
2	Belum optimalnya layanan pengumpulan sampah di UPTD Wilayah II	Berkurangnya timbulan sampah yang diangkut ke TPST/TPA	Lingkungan yang asri dan sehat	Banyak timbulan sampah yang tidak terangkut sehingga mencemari lingkungan dan udara	Berkembangnya penyakit menular di tengah masyarakat	Luas
3	Belum optimalnya pengoperasian TPST/TPA	Tidak ada timbunan sampah yang tidak terproses di TPST/TPA	TPST/TPA siap berbisnis dengan offtaker	Timbunan sampah semakin menumpuk dan berbau	Pencemaran udara dan air, gangguan kesehatan masyarakat	Luas
4	Kinerja penanganan dan pengurangan sampah masih rendah	Masyarakat sadar untuk melakukan pemilahan sampah dan TPST/TPA berkinerja baik	Sampah menjadi sumber PAD baru	Misi RPJMD dan Renstra DLH terkait persampahan tidak tercapai	Penilaian buruk atas kinerja DLH	Luas

3.4 Rencana Pengembangan Layanan

Rencana pengembangan layanan dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah uraian detail sebagaimana berikut

1) *Related Diversification* (Keanekaragaman)

Diverifikasi pada BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II dapat dilihat berbagai macam jenis layanan yang sudah dikembangkan. Setiap layanan didukung oleh petugas atau pekerja yang memahami tugas dan fungsinya. Diverifikasi layanan pada UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II DLH Kabupaten Bandung meliputi:

- Bank sampah dan TPS 3R
- Produksi maggot
- Produksi RDF
- Kompos

2) *Market Development* (Pengembangan Pasar)

Pengembangan pasar yang dilakukan oleh BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II adalah dengan menjangkau konsumen atau masyarakat melalui peningkatan akses layanan pengangkutan sampah, misalnya dengan penjadwalan khusus bagi petugas lapangan untuk mengangkut sampah organik dan anorganik.

- Bank sampah dan TPS3R

Promosi pelayanan terhadap nasabah aktif dilakukan melalui media sosial, sementara untuk menjaring calon nasabah direncanakan membentuk jejaring kerja dengan melibatkan aparat desa dan wilayah setempat serta masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam pengelolaan sampah

- Produksi maggot

Proses promosi dan sosialisasi dilakukan oleh tim sosialisasi dan edukasi secara rutin ke sekolah dan kantor desa serta sesuai permintaan dari masyarakat atau kelompok swadaya tertentu

- Produksi RDF

Proses promosi dan sosialisasi akan dilakukan oleh tim sosialisasi dan edukasi ke industri untuk meningkatkan keinginan industri menjadikan RDF sebagai bahan bakar alternatif, mengingat kapasitas TPST Oxbow Cicukang akan ditingkatkan menjadi 70 ton/hari dalam pengelolaan sampahnya, sehingga RDF yang dihasilkan pun akan meningkat juga.

- Kompos

3) *Product Development* (Pengembangan Produk)

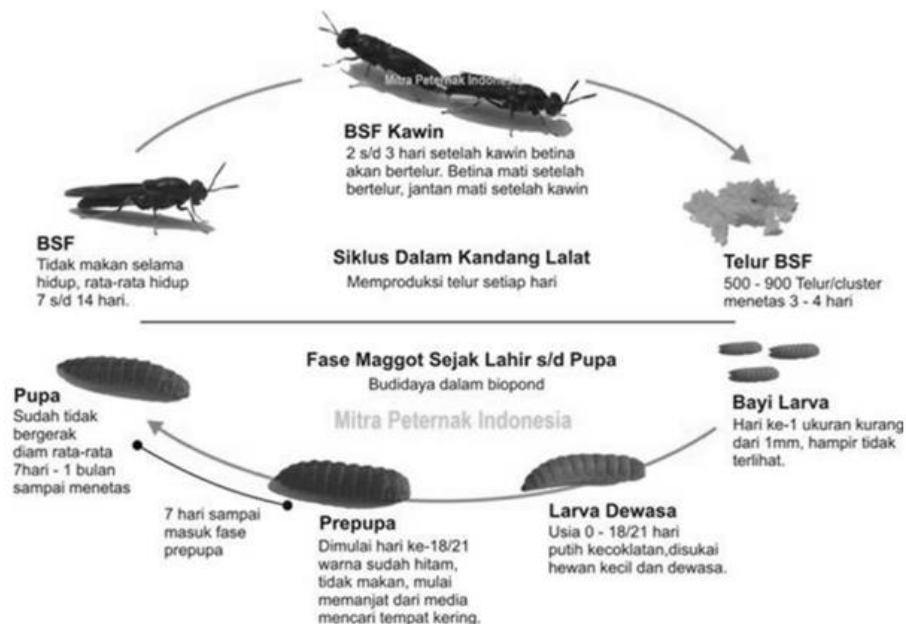
Pengembangan produk layanan yang dilakukan oleh BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II berfokus pada pemenuhan kebutuhan konsumen, yang didasarkan pada hasil identifikasi kebutuhan serta umpan balik dari masyarakat. Beberapa layanan yang menjadi unggulan di antaranya adalah

- Bank Sampah dan TPS3R

Pengembangan layanan Bank Sampah dapat meningkatkan kapasitas layanan bank sampah dengan memperbanyak unit bank sampah sehingga nasabah bank sampah juga dapat meningkat dan pemanfaatan sampah *high value* dari sampah yang terkumpul juga semakin banyak

- Produksi Maggot

Layanan produksi maggot merupakan layanan yang memanfaatkan sampah organik menjadi pakan utama maggot. Pemanfaatan limbah organik dapat dilakukan dengan menjadikannya sebagai media tumbuh larva melalui mekanisme biokonversi. Biokonversi merupakan perombakan sampah organik yang melibatkan makhluk hidup, salah satunya menggunakan larva serangga berupa Black Soldier Fly (BSF). Pada saat berbentuk larva, BSF mampu mengkonversi limbah organik karena memiliki enzim dan bakteri dalam ususnya yang membantu memecah bahan organik menjadi nutrisi yang dapat mereka konsumsi. Larva ini merupakan fase kedua dari proses metamorphosis atau proses perkembangan dari telur menjadi lalat dewasa.



Gambar 3.5 Siklus Hidup Maggot

Kelebihan dari budidaya maggot yaitu tidak menimbulkan bau menyengat, cukup higienis dan tidak membawa sumber penyakit yang berbahaya bagi ternak maupun manusia. Kelebihan lain dari budidaya maggot BSF yaitu membutuhkan waktu yang lebih singkat dan setiap hari maggot BSF membutuhkan makanan dari sampah organik. Sementara itu maggot yang dihasilkan akan diolah menjadi pakan ikan lele dan kompos berupa kasgot (media bekas budidaya maggot).

- Produksi RDF

Layanan Produksi RDF merupakan layanan pengolahan sampah anorganik hasil dari proses pemilahan, pencacahan, pengeringan, dan pembentukan RDF. Semakin besar timbunan sampah yang terlayani maka akan semakin besar pula RDF yang dihasilkan

4) *Vertical Integration* (Integrasi Vertikal)

Pengembangan pelayanan melalui strategi vertikal dilaksanakan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait melalui koordinasi perencanaan anggaran, pembinaan dan pengawasan serta integrasi kegiatan yang menjadi prioritas di Kabupaten Bandung.

- Bank Sampah dan TPS3R

DLH sebagai unsur pembina, kemudian lembaga yang bergerak dalam kegiatan ini dan masyarakat sebagai objek atau nasabah yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam kegiatan bank sampah ini

- Produksi Maggot

Proses produksi maggot masih dilakukan oleh unsur pelaksana yang ditugaskan di TPST Oxbow Cicukang. Komunitas Pegiat Maggot yang ada di Kabupaten Bandung (Paguyuban Pegiat Maggot Nusantara) dapat dijadikan sebagai mitra strategis BLUD dalam pengolahan sampah organik, produksi maggot dan produksi turunannya, penguatan rantai pasok usaha, perluasan pasar hasil olahan serta pemberdayaan masyarakat.

- Produksi RDF

Proses produksi RDF dilakukan oleh unsur pelaksana yang ditugaskan di TPST Oxbow Cicukang

- Kompos

5) Pengembangan Jenis Pelayanan

Peningkatan jumlah sampah yang diangkut dari sumber ke TPST Oxbow Cicukang setiap tahunnya mendorong BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II DLH Kabupaten Bandung untuk melakukan inivasi guna meningkatkan efisiensi layanan kepada masyarakat, misalnya melalui penambahan armada angkutan berupa motor roda tiga agar jangkauannya layanan menjadi lebih luas.

- Bank Sampah dan TPS3R

Pengembangan pelayanan untuk bank sampah dan TPS3R merupakan kebutuhan pengurangan sampah yang terangkut ke TPA, kebutuhan pemanfaatan sampah anorganik *high value* dan *low value* yang masih memiliki manfaat sebagai bahan baku olahan energi baru terbarukan, sirkular ekonomi bagi kelompok masyarakat tertentu atau pelaku usaha. Waktu pelayanan secara rutin dilakukan pada senin sampai sabtu.

Sosialisasi dan edukasi bank sampah akan rutin dilakukan untuk menjangkau nasabah bank sampah. Jenis pelayanan bank sampah yang dilakukan seperti pendaftaran menjadi nasabah, pembuatan rekening tabungan nasabah, penjadwalan dan pelayanan pengangkutan.

Masyarakat yang telah berstatus nasabah berperan aktif bertransaksi jual beli sesuai jadwal dengan harga yang ditawarkan. Adapun bank

sampah yang aktif di wilayah pelayanan BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II DLH Kabupaten Bandung sebanyak 56 unit bank sampah. Berikut merupakan bank sampah tersebut

Tabel 3.5 Bank Sampah Yang Aktif Di Wilayah Pelayanan BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II DLH Kabupaten Bandung

No	Nama Fasilitas	Alamat	Desa	Kecamatan	Sampah yang dikelola (kg/hari)
1	Katumbiri	Pangkalan padamukti RT 02 RW 07	Margamukti	Pangalengan	20,00
2	IKHWAL	Kp. Cibiana RT 02 RW 10	Cikalong	Cimaung	48,50
3	Campaka Wangi	Kp Rancamanyar RT 01 RW 10 Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung	Margamukti	Pangalengan	67,96
4	Putra Putri Mandiri	Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung	Margamukti	Pangalengan	53,63
5	Sejahtera	Kp. Leuwi Nutug RT 04 RW 02 Desa Pananjung	Pananjung	Cangkuang	22,56
6	BS Cibogo	RW 01 Desa Lagadar	Lagadar	Margaasih	14,10
7	Gistex		Nanjung	Margaasih	9,02
8	Berkah Seber Kenanga	KP. Sukaluyu RT 06 RW 13 Desa Sayati	Sayati	Margahayu	66,66
9	Lestari Bersatu		Pangalengan	Pangalengan	225,60
10	BS RW 08		Pangalengan	Pangalengan	14,10
11	SMKN 5		Pangalengan	Pangalengan	14,10
12	Margaluyu Berseka	Kp. Margaluyu RW 16 Desa Pangalengan	Pangalengan	Pangalengan	7,05
13	KSM AIRI		Pulosari	Pangalengan	14,10
14	KSM Walatra	Kp.Cileutk RT 02 RW 07 Desa Banjaran Wetan Kec. Banjaran	Banjaran Wetan	Banjaran	18,57
15	SUHARJO	KP. CICUKANG RT 05 RW 02 Desa Mekarrahayu Kec. Margaasih	Mekarrahayu	Margaasih	71,71
16	UNDANG	KP. CICUKANG RT 04 RW 02 Desa Mekarrahayu Kec. Margaasih	Mekarrahayu	Margaasih	40,28
17	ENTIS SUTISNA	KP. CICUKANG RT 06 RW 02 Desa Mekarrahayu Kec. Margaasih	Mekarrahayu	Margaasih	74,7143
18	AYI SUJANA	KP. CICUKANG RT 03 RW 28 Desa Mekarrahayu Kec. Margaasih	Mekarrahayu	Margaasih	7,1429
19	DODO HERMANSYAH	KP. CICUKANG RT 02 RW 28 Desa Mekarrahayu Kec. Margaasih	Mekarrahayu	Margaasih	38,5714
20	TOHEH	KP. CICUKANG RT 05 RW 01 Desa Mekarrahayu Kec. Margaasih	Mekarrahayu	Margaasih	29,2857

No .	Nama Fasilitas	Alamat	Desa	Kecamatan	Sampah yang dikelola (kg/hari)
21	KOMAR	KP. CICUKANG RT 04 RW 01 Desa Mekarrahayu Kec. Margaasih	Mekarrahayu	Margaasih	25,7143
22	ADI	KP. CICUKANG RT 02 RW 01 Desa Mekarrahayu Kec. Margaasih	Mekarrahayu	Margaasih	25,0000
23	YUSUP	KP. CICUKANG RT 08 RW 16 Desa Mekarrahayu Kec. Margaasih	Mekarrahayu	Margaasih	21,4286
24	Bank sampah sajalur 05	KP BABAKAN RT 01 RW 05 Desa Sindangpanon RT 01 RW 05	Sindangpanon	Banjaran	232,8571
25	AVIT	Kp. Babakan Bandung RT 04 RW 01 Desa Malasari Kec. Cimaung	Malasari	Cimaung	0,0000
26	ASEP SUMIRAT	Kp. Babakan Bandung RT 05 RW 03 Desa Malasari Kec. Cimaung	Malasari	Cimaung	0,0000
27	ADE WASMAN	Kp. Cigadog RT 04 RW 04 Desa Malasari Kec. Cimaung	Malasari	Cimaung	0,0000
28	MAMAT	Kp. Cikuda RT 01 RW 05 Desa Malasari Kec. Cimaung	Malasari	Cimaung	0,0000
29	USEP SAEPULOH	Kp. Cikuda RT 03 RW 05 Desa Malasari Kec. Cimaung	Malasari	Cimaung	0,0000
30	Asep	Kp.Batukeris RT 001 RW 015 Desa Banjaran Wetan Kec. Banjaran	Banjaran Wetan	Banjaran	71,4286
31	Saepudin	Kp.Sirahranca RT 002 RW 009 Desa Banjaran Wetan Kec. Banjaran	Banjaran Wetan	Banjaran	15,7143
32	Ondi	Kp.Pengkolan RT 003 RW 003 Desa Banjaran Wetan Kec. Banjaran	Banjaran Wetan	Banjaran	39,28
33	Sumarni	Kp.Sirahranca Desa Banjaran Wetan Kec. Banjaran	Banjaran Wetan	Banjaran	17,14
34	E.Carmana	Kp.Cikamadong Desa Banjaran Wetan Kec. Banjaran	Banjaran Wetan	Banjaran	64,28
35	SAEPUDIN ROHMAN	KP. PAJAGALAN RT 03 RW 12 Desa Banjaran Kecamatan Banjaran	Banjaran	Banjaran	101,42
36	MACAKAL	KP. PINTUSARI RT 04 RW 08 Desa Banjaran Kecamatan Banjaran	Banjaran	Banjaran	142,85
37	ENJUH	KP. GIRANGDEUKEUT RT 01 RW 09 Desa Banjaran Kecamatan Banjaran	Banjaran	Banjaran	14,28
38	ADE KOMAR	KP. SASAKDUA RT 05 RW 07 Desa Banjaran Kecamatan Banjaran	Banjaran	Banjaran	21,42

No .	Nama Fasilitas	Alamat	Desa	Kecamatan	Sampah yang dikelola (kg/hari)
39	HERMAN PELANI	KP. STASION BARAT RT 01 RW 10 Desa Banjaran Kecamatan Banjaran	Banjaran	Banjaran	15,00
40	DEDI H SALIMUDIN	KP. SIRNAPIKIR RT 02 RW 02 Desa Banjaran Kecamatan Banjaran	Banjaran	Banjaran	17,85
41	EMAN SUPARMAN	KP. BBK CIDEMANG RT 01 RW 02 Desa Banjaran Kecamatan Banjaran	Banjaran	Banjaran	12,85
42	II KENDI	KP. PINTUSARI RT 02 RW 08 Desa Banjaran Kecamatan Banjaran	Banjaran	Banjaran	14,28
43	ARI SALIM	KP. SASAKDUA RT 01 RW 07 Desa Banjaran Kecamatan Banjaran	Banjaran	Banjaran	328,57
44	Agus Sutisna	Kp.Lembang RT 001 RW 001 Desa Kiangroke Kecamatan banjaran	Kiangroke	Banjaran	428,57
45	Iwan Gunawan	kp Lembang RT 06 RW 04 Desa Kiangroke Kecamatan banjaran	Kiangroke	Banjaran	521,42
46	Adi barli (barli berkah mandiri	kp. Girang RT.1/15 Ds Ciapus Kec. Banjaran	Ciapus	Banjaran	857,14
47	yana taryana	Kp Cipeundeuy RT4 RWw07 ds.tarajusari kec.banjaran	Tarajusari	Banjaran	100,00
48	ripto garna	kp.cipeundeuy RT 02 RW06 ds.tarajusari kec.banjaran kab.bandung	Tarajusari	Banjaran	48,57
49	Undang	kp cipeundeuy rt4rw07 Dea Tarajusari Kec. Banjaran	Tarajusari	Banjaran	3,85
50	Alit Suarya	Jalan citere, Hergarmanah RT 01 RW 20 Desa Pangalengan Kec. Pangalengan	Pangaleng an	Pangaleng an	100,00
51	Heber Simbolon	Jalan pd Awas Desa Sukamanah Kec. Pangalengan	Sukamanah	Pangaleng an	207,14
52	Gudang Rongsok Hj Opik	Jalan Babakan Laksana Desa Pangalengan Kec. Pangalengan	Pangaleng an	Pangaleng an	214,28
53	Ila Sudrajat	Kp. Kiara sinar wngi RT 3 RW 5 Desa Pulosari Kec. Pangalengan	Pulosari	Pangaleng an	142,85
54	Aira	kp Desa Pulosari Kec. Pangalengan	Pulosari	Pangaleng an	293,71
55	Useng Sudriman	kp. Cinangsi RT 03 RW 05 Desa Pulosari Kec. Pangalengan	Pulosari	Pangaleng an	314,28
56	KOSWARA	KP PATALA RT 03 RW 08 Desa Sindangpanon Kecamatan Banjaran	Sindangpan on	Banjaran	228,57
JUMLAH					5.499,54

Sedangkan TPS 3R yang aktif adalah 12 unit dari total 37 unit.

No.	Nama Fasilitas	Alamat	Desa	Kecamatan	Tahun Pembangunan	Jumlah sampah yang dikelola (ton/hari)
		(Kelurahan/Desa, Kecamatan)				
1	TPS Marsel/berseka	Jln Sampora kp kebonkalapa rt 01 rw 06 Desa Margahayu Selatan Kec. Margahayu	Desa Margahayu Selatan	Margahayu	2006	5,00
2	Cangkuang	Cangkuang, Kp. Cangkuang RT.03/ RW 05 Desa Cangkuang Kecamatan Cangkuang	Desa Cangkuang	Cangkuang	2011	0,88
3	Margahurip	Margahurip Kp. Kebon kalapa RT.04 /RW 08 Desa Margahurip Kecamatan Banjaran	Desa Margahurip	Banjaran	2011	0,00
4	TPS3R 017	TPS3R 017 Desa Margamukti Pangalengan	Desa Margamukti	Pangalengan	2014	0,45
5	Berkah Mandiri	Jl. Panyaungan RW.07 Desa Jatisari Kec. Cangkuang	Desa Jatisari	Cangkuang	2020	0,71
6	Sajalur	Komplek BSPI RT 4 RW 12 Desa Sindangpanon Kec. Banjaran	Desa Sindangpanon	Banjaran	2020	0,67
7	BEDAS LESTARI	Komp. Banda Asri Rt 001 Rw 008 Bandasari Cangkuang	Desa Bandasari	Cangkuang	2021	0,60
8	Barokah	RT. 01 RW. 09 Tanjungsari Cangkuang	Desa Tanjungsari	Cangkuang	2022	0,84
9	Marteng	Margahayu Tengah Margahayu	Desa Margahayu Tengah	Margahayu	2014	4,70
10	KPP Ciwidara Asri	Kp. Ciwidara RT.05/RW.14, Pangalengan Pangalengan	Desa Pangalengan	Pangalengan	2022	0,57
11	KPP Sukaberseri	Kp. Kebon Kalapa RT.03/RW.06 Sukamenak Margahayu	Desa Sukamenak	Margahayu	2022	0,71
12		Sukamanah Sukamanah Pangalengan	Desa Sukamanah	Pangalengan	2023	0,56
Jumlah						15,67

- Produksi Maggot

Layanan produksi maggot merupakan layanan yang bersifat profit, di TPST Oxbow Cicukang telah terdapat pengelolaan sampah organik menggunakan maggot. Pengembangan yang akan dilakukan yakni penambahan kapasitas pengolahan sampah organik dengan menggunakan maggot dengan menambah jumlah maggot yang dikembangkan.

- Produksi RDF

Produksi RDF merupakan pelayanan utama yang akan ditingkatkan pada UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II, kapasitas yang akan dipasang tahun ini adalah 30 ton/hari melalui dana APBD dan 40 ton/hari dari dukungan dan intervensi Program ISWPM. Program ISWMP (*Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Mteropolitan Cities Project*) merupakan program peningkatan pengelolaan sampah berbasis kinerja di daerah. Program ini digagas oleh Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari upaya nasional dalam pengelolaan sampah, serta memperoleh dukungan dan pembiayaan dari World Bank dalam bentuk pinjaman dan bantuan teknis. Dukungan yang diberikan tersebut untuk penataan bangunan TPST serta penataan kinerja mesin dan peralatan.

Alur dari produksi RDF diawali dengan pengangkutan, pendistribusian sampah, penimbangan berat sampah, pemilahan sampah pada konveyor, pengolahan dengan mesin gibrig, pengeringan sampah organik, pengepresan sampah anorganik, penimbangan dan pengiriman ke offtaker.

6) Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan

- Bank Sampah dan TPS3R

Pelayanan bank sampah memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung proses pemilahan, pengangkutan, serta pendistribusian material, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

untuk meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan kepada nasabah.

- Produksi Maggot

Pelayanan produksi maggot membutuhkan dukungan sarana dan prasarana berupa fasilitas pewadahan, sistem pendistribusian, unit pembiakan (insectarium), serta ketersediaan lahan atau bangunan pembiakan yang cukup luas sesuai dengan kapasitas produksi yang direncanakan.

- Produksi RDF

Sarana prasarana yang dibutuhkan untuk produksi RDF berupa bangunan TPST serta berbagai macam mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi 70 ton/hari RDF yang dihasilkan.

7) Pengembangan Mutu SDM Pelayanan

Program pengembangan sumber daya manusia BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II Kabupaten Bandung lima tahun ke depan diarahkan pada pemenuhan jumlah SDM agar berada pada rasio yang ideal. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia juga diarahkan agar memenuhi kualifikasi SDM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelayanan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Program pengembangan SDM pada BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II dijabarkan sebagai berikut:

- a. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi terpercaya dalam rangka memenuhi tenaga pengelola sampah sesuai dengan kebutuhan BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II.
- b. Mengembangkan tenaga pengelola sampah yang potensial ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri.
- c. Merintis kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pengembangan kemampuan SDM baik tenaga pengelola sampah maupun administrasi melalui kegiatan penelitian, kegiatan ilmiah, diskusi panel, seminar, simposium, lokakarya, pelatihan/diklat, penulisan buku, studi banding, dll.
- d. Meningkatkan standar pendidikan tenaga administratif yang potensial, terutama ke jenjang Diploma III dan S1.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi adalah suatu kondisi ideal yang ingin diwujudkan dan memungkinkan untuk dicapai. Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana arah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan di masa depan yang diinginkan, yang menjadi suatu pedoman dan pendorong pemerintah dan masyarakat untuk mencapai mental model masa depan, dengan demikian visi harus menjadi milik bersama dan diyakini bersama.

Visi yang dimaksudkan dalam Rencana Strategis BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II DLH Kabupaten Bandung dalam dokumen ini adalah kondisi layanan BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II DLH Kabupaten Bandung yang ideal yang ditetapkan sebagai salah satu upaya sistemik dalam rangka pencapaian realisasi Renstra DLH Kabupaten Bandung dan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 .

Visi BLUD Pengelolaan Persampahan disusun dengan semangat sinkronisasi terhadap Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung sebagai payung besar kebijakan daerah, yang berbunyi "Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas".

Keterkaitan ini memastikan bahwa setiap target layanan persampahan tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi kontribusi nyata dalam mewujudkan capaian pembangunan daerah, khususnya pada aspek peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menyelaraskan visi, BLUD secara otomatis menjadi instrumen strategis Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan janji politik dan target makro yang telah ditetapkan di tingkat kabupaten.

Secara teknis, visi RPJMD memberikan arah mengenai standar hidup dan kualitas lingkungan yang ingin dicapai, sementara visi BLUD menjabarkannya ke dalam misi operasional yang mandiri dan profesional. Hubungan ini bersifat kausalitas; keberhasilan BLUD dalam mengelola sampah secara efektif di Wilayah II akan secara langsung mendongkrak indikator kinerja utama (IKU) daerah yang tertuang dalam RPJMD. Narasi keterkaitan ini menegaskan posisi BLUD Pengelolaan Persampahan bukan hanya sebagai unit pelaksana teknis, melainkan sebagai mesin penggerak utama dalam mencapai visi Kabupaten Bandung yang bersih dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu kondisi ideal yang ingin diwujudkan dan memungkinkan untuk dicapai. Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana arah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan di masa depan yang diinginkan, yang menjadi suatu pedoman dan pendorong pemerintah

dan masyarakat untuk mencapai mental model masa depan, dengan demikian visi harus menjadi milik bersama dan diyakini bersama.

Visi yang dimaksudkan dalam Rencana Strategis BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II DLH Kabupaten Bandung dalam dokumen ini adalah kondisi layanan BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II DLH Kabupaten Bandung yang ideal yang ditetapkan sebagai salah satu upaya sistemik dalam rangka pencapaian realisasi Renstra DLH Kabupaten Bandung dan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 .

Visi BLUD Pengelolaan Persampahan disusun dengan semangat sinkronisasi terhadap Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung sebagai payung besar kebijakan daerah, yang berbunyi "Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas".

Keterkaitan ini memastikan bahwa setiap target layanan persampahan tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi kontribusi nyata dalam mewujudkan capaian pembangunan daerah, khususnya pada aspek peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menyelaraskan visi, BLUD secara otomatis menjadi instrumen strategis Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan janji politik dan target makro yang telah ditetapkan di tingkat kabupaten.

Secara teknis, visi RPJMD memberikan arah mengenai standar hidup dan kualitas lingkungan yang ingin dicapai, sementara visi BLUD menjabarkannya ke dalam misi operasional yang mandiri dan profesional. Hubungan ini bersifat kausalitas; keberhasilan BLUD dalam mengelola sampah secara efektif di Wilayah II akan secara langsung mendongkrak indikator kinerja utama (IKU) daerah yang tertuang dalam RPJMD. Narasi keterkaitan ini menegaskan posisi BLUD Pengelolaan Persampahan bukan hanya sebagai unit pelaksana teknis, melainkan sebagai mesin penggerak utama dalam mencapai visi Kabupaten Bandung yang bersih dan berkelanjutan.

4.1 Visi BLUD Pengelolaan Sampah

Visi BLUD UPTD Pengelolaan Persampahan Wilayah II DLH Kabupaten Bandung mengacu pada visi-misi Pemerintah Kabupaten Bandung khususnya misi yang ke-4 yakni "*Lingkungan & Infrastruktur: Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.*" serta Renstra DLH Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Apabila terjadi perubahan pada visi Pemerintah Kabupaten Bandung, maka visi BLUD UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II DLH Kabupaten Bandung juga akan disesuaikan melalui proses revisi.

Adapun visi BLUD yang diusung adalah (contoh kalaku berkenan)

"Terwujudnya Pengelolaan Sampah di BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II DLH Kabupaten Bandung yang professional dan berkualitas pada tahun 2029 "

Pernyataan visi tersebut diatas mengandung substansi bahwa pengelolaan persampahan di BLUD Pengelolaan Persampahan Wilayah II DLH Kabupaten Bandung sampai tahun 2030. Makna kata-kata yang terkandung dalam pernyataan visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Terwujudnya; BLUD Pengelolaan Persampahan Wilayah II DLH Kabupaten Bandung yang mampu melakukan pengelolaan persampahan sejak dari hulu ke hilir dan menguntungkan

Profesional ; Para pengelola BLUD Pengelolaan Persampahan memiliki integritas, etos dan kompetensi yang baik dalam menjalankan operasional BLUD.

Berkualitas; BLUD yang berkualitas adalah yang berhasil mengubah paradigma "kumpul-angkut-buang" menjadi "pilah-olah-pulih" dengan manajemen keuangan yang mandiri.

Tahun 2030; merupakan angka tahun akhir dari umur renstra sekaligus tahun akhir pencapaian SDG's

Narasi visi praktis UPT BLUD pengelolaan sampah diatas telah memenuhi aspek pernyataan sebuah visi, yakni.

- 1) Berperspektif Jangka Panjang (*Longterm Perspective*) : tahun 2030
- 2) Bermuatan Pikiran Strategis (*Strategic Thinking*) : Pengelola yang terpercaya dan profesional
- 3) Bermuatan Mimpi (*Dream*) : BLUD Pengelolaan Sampah yang berkualitas
- 4) Bermuatan antisipasi masa depan (*Anticipate Future*) : Mengurangi resiko akibat meningkatnya jumlah sampah yang harus dikelola BLUD
- 5) Bermuatan hal yang Ideal : Produk sampah sebagai sumber PAD baru

4.2 Misi BLUD Pengelolaan Sampah

Untuk mencapai visi maka dirumuskan misi BLUD UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II DLH Kabupaten Bandung sebagai berikut: (contoh bila berkenan)

- 1) Membangun kemitraan dengan Masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah di Tingkat rumah tangga
- 2) Mengembangkan pola angkutan dan pemrosesan sampah di lokus Wilayah II DLH Kabupaten Bandung secara digital
- 3) Mengembangkan kemitraan dengan off taker dan pihak lain yang menggunakan produk BLUD

Makna yang terkandung dalam misi BLUD Pengelolaan Persampahan Wilayah II DLH Kabupaten Bandung dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Membangun kemitraan dengan Masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah di Tingkat rumah tangga.

Misi untuk membangun kemitraan dengan masyarakat dalam pemilahan sampah di tingkat rumah tangga merupakan langkah strategis untuk menggeser paradigma pengelolaan sampah dari kumpul-angkut-buang menjadi pengurangan di sumber. Melalui kolaborasi ini, BLUD tidak hanya

berperan sebagai pengangkut limbah, tetapi juga sebagai fasilitator yang mengedukasi dan memberdayakan warga untuk memisahkan sampah organik dan anorganik sejak dini. Kemitraan ini bertujuan untuk menurunkan volume beban sampah yang masuk ke TPA, yang secara langsung akan meningkatkan efisiensi operasional dan memperpanjang umur pakai sarana prasarana persampahan.

Secara fungsional, misi ini diimplementasikan melalui penyediaan sistem insentif, pendampingan teknis bagi bank sampah/TPS3R, serta penguatan kelembagaan di tingkat rukun tetangga atau desa. Dengan terciptanya pemilahan di tingkat rumah tangga, BLUD dapat mengelola aliran sampah yang telah terpilah menjadi produk bernilai ekonomis atau bahan baku energi dengan lebih mudah. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat ini menjadi fondasi utama dalam menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang mandiri, di mana masyarakat menjadi mitra aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mendukung keberlanjutan fiskal BLUD.

2) Mengembangkan pola angkutan dan pemrosesan sampah di lokus Wilayah II DLH Kabupaten Bandung secara digital

Misi mengembangkan pola angkutan dan pemrosesan sampah secara digital di Wilayah II merupakan langkah transformasi menuju manajemen persampahan yang presisi, transparan, dan akuntabel. Melalui integrasi teknologi informasi, BLUD dapat memantau pergerakan armada secara *real-time* melalui GPS, mengoptimalkan rute pengangkutan untuk efisiensi bahan bakar, serta mendigitalisasi pencatatan volume sampah yang masuk di titik-titik pemrosesan. Digitalisasi ini menghilangkan celah manipulasi data dan memberikan kepastian layanan kepada masyarakat, sehingga setiap ton sampah yang terangkut dapat terukur dan terkelola dengan standar teknis yang tepat.

Pada aspek manajerial, penerapan sistem digital di lokus Wilayah II memungkinkan adanya integrasi data antara pelayanan lapangan dengan sistem penagihan retribusi secara elektronik (*e-retribusi*). Hal ini tidak hanya mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran, tetapi juga mempercepat proses rekonsiliasi keuangan BLUD secara otomatis dan akurat. Dengan mengadopsi pola kerja berbasis data digital, BLUD Pengelolaan Persampahan Wilayah II dapat melakukan evaluasi kinerja secara lebih tajam, merespons keluhan warga dengan lebih cepat, dan mewujudkan tata kelola organisasi yang modern sesuai dengan prinsip *smart city* di Kabupaten Bandung.

3) Mengembangkan kemitraan dengan off taker dan pihak lain yang menggunakan produk BLUD

Misi mengembangkan kemitraan dengan *off-taker* dan pihak ketiga merupakan langkah strategis untuk mengubah wajah BLUD dari sekadar unit layanan publik menjadi entitas yang memiliki nilai tambah ekonomi. Dengan menjalin kerja sama bersama industri semen sebagai pengguna *Refuse Derived Fuel* (RDF), pabrik daur ulang plastik, atau sektor pertanian untuk pupuk organik, BLUD memastikan bahwa seluruh output dari proses pengolahan sampah memiliki penyerapan pasar yang pasti.

Kemitraan ini berfungsi sebagai jaminan keberlangsungan operasional (*sustainability*), di mana hasil olahan sampah tidak kembali menjadi tumpukan limbah, melainkan menjadi komoditas yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD.

Secara finansial dan manajerial, keterlibatan *off-taker* memberikan kepastian arus kas (*cash flow*) non-retribusi yang memperkuat kemandirian fiskal BLUD Pengelolaan Persampahan Wilayah II. Selain itu, kolaborasi dengan pihak lain seperti akademisi, investor teknologi, atau lembaga donor dapat mempercepat transfer teknologi dan inovasi dalam pemrosesan sampah. Melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan ini, BLUD mampu menciptakan ekosistem ekonomi sirkular yang solid, di mana sampah dikelola secara profesional untuk menghasilkan energi atau material baru yang bermanfaat bagi industri dan pembangunan daerah.

4.3 Nilai

Untuk menggapai visi-misi seperti di urai diatas segenap pengelola BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II DLH Kabupaten Bandung harus menganut nilai nilai seperti berikut:

Tabel 4.1 Nilai Nilai Pengelola BLUD Pengelolaan Persampahan Wilayah II DLH Kabupaten Bandung

Nilai	Jabaran
Kolaboratif	BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II mengedepankan kerja kerja kolaboratif dalam mendukung pngelolaan persampahan yang berkelanjutan. BLUD Pengelolaan Persampahan Wilayah II DLH Kabuaten Bandung menempatkan para mitra sebagai teman seperjuangan berdasarkan asa partitipasi dan keterbukaan
Profesional	BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II akan selalu mengedepankan aspek profesional dalam bermitra dengan pihak lain, dengan menjamin kualitas pekerjaan paripurna serta ketepatan waktu dalam melakukan kemitraan.
Integritas	BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II memiliki integritas yang melekat dalam setiap diri staff, dan pimpinan untuk tidak melakukan tindakan korup dan kerugian bagi orang lain
Inovatif	BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II terbuka pada pengembangan teknologi dan cara baru dalam pengelolaan sampah
Sabilulungan	Pengelolaan sampah diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, komunitas, dunia usaha dan UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II dalam upaya pengurangan, pemilahan, pengolahan dan penanganan sampah secara bersama-sama dan berkelanjutan.

4.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2024–2044 merupakan dokumen strategis yang berfungsi sebagai pedoman dalam penentuan arah kebijakan pemanfaatan ruang. RTRW digunakan sebagai acuan mengendalikan pembangunan, menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta memastikan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan terutama berkaitan dengan pembangunan sarana pengelolaan sampah. Dengan demikian, kajian terhadap RTRW menjadi sangat penting dalam penyusunan Renstra UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II DLH Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029.

1) Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang

RTRW Kabupaten Bandung menetapkan tujuan utama penataan ruang, yaitu:

- Menjadikan Kabupaten Bandung sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Cekungan Bandung dengan kualitas lingkungan hidup yang tinggi.
- Menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- Menjamin keselarasan pembangunan dengan RTRW Provinsi Jawa Barat, RPJPD, dan RPJMD.

Kebijakan penataan ruang menekankan pada pengembangan pusat kegiatan pelayanan, transportasi berkelanjutan, pengelolaan sumber daya air dan energi, serta pelestarian lingkungan melalui rehabilitasi kawasan lindung, penyediaan ruang terbuka hijau minimal 30% di kawasan perkotaan, dan pengendalian alih fungsi lahan.

2) Struktur Ruang Kabupaten Bandung

Struktur ruang dibangun melalui dua komponen:

- Sistem pusat permukiman, yang membagi hierarki wilayah ke dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- Sistem jaringan prasarana, yang mencakup transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, pengendalian banjir, persampahan, drainase, hingga jaringan evakuasi bencana
 - Sistem jaringan persampahan terdiri atas SPA, TPS3R, dan TPST

3) Rencana Pola Ruang

Pola ruang Kabupaten Bandung terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya.

- Kawasan lindung meliputi badan air, hutan lindung ±34.137 Ha, kawasan perlindungan setempat, serta kawasan konservasi ±16.197 Ha. Kawasan ini berfungsi menjaga kualitas lingkungan, sumber air, serta keanekaragaman hayati.
- Kawasan budidaya mencakup pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, energi, industri, dan pariwisata. Arahkan RTRW menekankan agar pengelolaan kawasan budidaya tetap memperhatikan daya dukung lingkungan

4) Kawasan Strategis

RTRW menetapkan kawasan strategis yang relevan dengan pelayanan DLH, di antaranya:

- Kawasan Strategis Nasional (KSN) Cekungan Bandung, yang menuntut perlindungan fungsi lindung dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Bandung Utara (KBU), yang difokuskan untuk konservasi dan pengendalian alih fungsi lahan.
- Kawasan Strategis Kabupaten, misalnya Kawasan Bandung Selatan yang diarahkan untuk pelestarian lingkungan hidup, serta pengembangan wisata alam dan pertanian ramah lingkungan

Sejalan dengan RTRW dan kecamatan yang termasuk kedalam Pengelolaan Sampah Wilayah II DLH Kabupaten Bandung, TPS3R yang akan dibangun berada di Kecamatan Margahayu, Margaasih dan Banjaran.

Tabel 4.2 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Struktur Ruang	Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Instansi Teknis Pengelolaan Sampah	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Instansi Teknis Pengelolaan Sampah
Sistem jaringan prasarana, yang mencakup transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, pengendalian banjir, persampahan, drainase, hingga jaringan evakuasi bencana	1. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengelolaan persampahan TPA, TPST, SPA, TPS-3R, dan TPS kewenangan kabupaten; 2. Pembangunan TPA, TPST, SPA, TPS3R, dan TPS; 3. Pemeliharaan TPA, TPST, SPA, TPS3R, dan TPS; 4. Pengembangan TPA, TPST, SPA, TPS3R, dan TPS; 5. Rehabilitasi TPA, TPST, SPA, TPS3R, dan TPS; 6. Penyediaan sarana persampahan; dan 7. Penanganan sampah sungai.	Mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan cara pengolahan setempat per wilayah melalui teknik-teknik berwawasan lingkungan	Pembangunan TPS3R di Kecamatan Banjaran, Margaasih, dan Margahayu (termasuk kedalam Wilayah Layanan UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II DLH Kabupaten Bandung)

4.5 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS berperan penting dalam mengidentifikasi isu-isu lingkungan hidup yang bersifat mendasar, jangka panjang dan lintas sektor, sehingga dapat menjadi acuan dalam penyusunan Renstra BLUD UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II Tahun 2026-2029. Berdasarkan hasil penelaahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Catatan bagi Rekomendasi Sasaran PB Daerah, Strategi PB Daerah, dan Program PB Daerah pada KLHS RPJMD Tahun 2025-2029
Pengelolaan Sampah	isu strategis berkaitan dengan isu persampahan yakni belum optimalnya pengelolaan sampah, baik dari sisi pengurangan di sumber maupun pemanfaatan teknologi (misalnya RDF). Ketergantungan yang tinggi pada TPA masih menjadi kendala, sehingga perlu inovasi pengelolaan persampahan yang lebih ideal.	Sasaran PB Daerah yaitu terwujudnya layanan infrastruktur dasar yang merata dan berkualitas melalui terwujudnya Program Pengelolaan Persampahan

4.6 Telaah Rencana Strategis Pengelolaan Sampah UPTD Pengelolaan Sampah Wilayah II DLH Kabupaten Bandung

Dalam menyusun Rencana Strategis BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II DLH Kabupaten Bandung perlu dilakukan analisis terhadap Rencana Strategis Instansi yang lebih tinggi. Hasil analisi terhadap Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.4 Rencana Strategis Pelayanan Persampahan

No.	Indikator Kinerja	Capaian Tujuan/Sasaran Renstra Dinas Instansi Teknis Dinas Lingkungan Hidup (Kabupaten Bandung)	Sasaran pada Renstra Dinas Instansi Teknis Pengelola Sampah (Provinsi)	Sasaran pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Meningkatnya kualitas air dan menurunnya	Mengendalikan dan menurunkan	Menurunkan beban pencemaran

No.	Indikator Kinerja	Capaian Tujuan/Sasaran Renstra Dinas Instansi Teknis Dinas Lingkungan Hidup (Kabupaten Bandung)	Sasaran pada Renstra Dinas Instansi Teknis Pengelola Sampah (Provinsi)	Sasaran pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		pencemaran air dengan nilai IKA sebesar 65,64 Poin	beban pencemaran air dan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	lingkungan dan mengendalikan kerusakan lingkungan hidup
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Meningkatnya kualitas udara dan menurunnya pencemaran udara dengan nilai IKU sebesar 71,11 Poin	Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
3	Indek Kualitas Lahan (IKL)	Meningkatnya kualitas lahan dan tutupan lahan dengan nilai IKL sebesar 65,15 Poin	Peningkatan tutupan lahan/hutan melalui penguatan upaya rehabilitasi hutan, peningkatan tutupan vegetasi terutama di perkotaan, rehabilitasi lahan kritis/terlantar, pengendalian kerusakan ekosistem dan pemulihan tutupan lahan/hutan, kawasan bekas	Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumber daya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

No.	Indikator Kinerja	Capaian Tujuan/Sasaran Renstra Dinas Instansi Teknis Dinas Lingkungan Hidup (Kabupaten Bandung)	Sasaran pada Renstra Dinas Instansi Teknis Pengelola Sampah (Provinsi)	Sasaran pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			tambang, kawasan terkontaminasi B3 serta kawasan pesisir dan laut	
4	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim menghasilkan penurunan emisi GRK sebesar 6.920.897,54 ton CO ₂ eq	-	-
5	Timbunan sampah terolah difasilitas pengelolaan sampah (%)	33,88%	-	-
6	Persentase proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah (%)	32,77%	-	-

Berdasarkan telaah dokumen Rencana Strategis Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, teridentifikasi indikator kinerja yang harus diperhatikan dalam penyusunan Rencana Strategis BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II DLH Kabupaten Bandung yaitu Cakupan Pelayanan Penanganan Sampah dengan capaian sasaran Meningkatnya Pengelolaan Sampah.

4.7 Tujuan BLUD Pengelolaan Sampah

Rumusan tujuan strategis didapatkan dengan mengubah nuansa isu strategis yang bernada negative menjadi positif

Tabel 4.5 Isu Strategis Dan Tujuan Strategis

No	Isu Strategis	Tujuan Strategis
1	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan pemilahan sampah	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan pemilahan sampah ditingkat keluarga dan lingkungan
2	Belum optimalnya layanan pengumpulan sampah di lokus BLUD Pengelolaan Persampahan Wilayah II DLH Kabupaten Bandung	Meningkatkan pelayanan pengumpulan sampah diseluruh lokus BLUD Pengelolaan Persampahan wilayah II DLH Kabupaten Bandung
3	Belum optimalnya pengoperasian TPST/TPA	Optimalisasi kinerja TPST/TPA
4	Kinerja penanganan dan pengurangan sampah masih rendah	Meningkatkan kegiatan penanganan dan pengurangan sampah di BLUD Pengelolaan Persampahan wilayah II DLH Kabupaten Bandung

4.8 Sasaran Strategis

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Existing 2025
Tujuan 1 Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk melakukan kegiatan pemilahan sampah di lingkungan	Keterlibatan peran TPS3R dan Bank Sampah dalam pengelolaan sampah di tingkat masyarakat	Meningkatnya peran TPS3R dan Bank Sampah dalam pengelolaan sampah di tingkat masyarakat	- Jumlah TPS3R yang berfungsi dalam pengelolaan sampah - Jumlah bank sampah yang berperan dalam kegiatan pengurangan sampah di tingkat masyarakat	- 48% TPS3R berfungsi dalam pengelolaan sampah - 49,56% bank sampah berfungsi dalam pengurangan sampah di masyarakat
Tujuan 2 Meningkatkan	Terselenggaranya pelayanan pengumpulan	Sasaran 2.1 Meningkatnya layanan	Prosentasi (%) rumah tangga	Rumah tangga mendapatkan

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Existing 2025
an pelayanan pengumpulan sampah di wilayah layanan BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II DLH Kabupaten Bandung	sampah di lokus BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II DLH Kabupaten Bandung	pengumpulan sampah di TPST pengumpulan sampah di masyarakat	mendapatkan layanan pengumpulan sampah	layanan pengumpulan Sampah RT sebesar 41,0%
		Sasaran 2.2 Meningkatkan cakupan layanan pengangkutan sampah ke TPA	Jumlah sampah terangkut ke TPA (ton/hari)	Jumlah sampah terangkut 73,34 ton/hari
Tujuan 3 Optimalisasi kinerja TPST	Fungsi operasi TPST yang optimal dan berkelanjutan	Meningkatkan fungsi sarana TPST dalam pengolahan sampah	% pemanfaatan kapasitas TPST	0 %
Tujuan 4 Meningkatkan kegiatan penanganan dan pengurangan sampah di BLUD Pengelolaan Sampah wilayah II DLH Kabupaten Bandung	Tertangainya timbulan sampah di wilayah layanan UPTD wilayah II Kabupaten Bandung	Sasaran 4.1 Meningkatkan jumlah sampah ditangani	% jumlah timbulan sampah tertangani	26,93 %
		Sasaran 4.1 Meningkatkan jumlah pengurangan sampah	% jumlah sampah berkurang	6,76 %

BAB V
KEBIJAKAN, PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKAN
PENDANAAN

Untuk dapat mewujudkan seluruh sasaran strategis yang telah ditetapkan, BLUD Pengelolaan Persampahan Wilayah II DLH Kabupaten Bandung akan lebih efektif jika direspon dengan strategi pencapaian matang dan sistematis. Strategi pencapaian tersebut terdiri dari sejumlah kebijakan, program dan kegiatan strategis. Kebijakan strategis akan lahir secara baik dan benar jika terlebih dahulu mengurai faktor- faktor keberhasilan. Faktor keberhasilan terdiri dari dua bagian yakni faktor pendukung dan faktor penghambat. Setelah melalui analisis dan diskusi mendalam, akhirnya ditemukan faktor keberhasilan tersebut sebagai berikut:

5.1 Kebijakan

No	Sasaran	Faktor keberhasilan		Kebijakan
		Penghambat	Pendukung	
1	Seluruh TPS3R dan Bank Sampah di lokus BLUD Wilayah II DLH Kabupaten Bandung telah melakukan kegiatan pengelolaan sampah di tingkat masyarakat	Banyak TPS3R dan Bank Sampah yang tidak berfungsi lagi	Pembinaan yang terus menerus dari DLH	Memperkuat dan memberikan rewards atau penghargaan secara priodik bagi pengelola TPS3R maupun Bank Sampah serta nasabah Bank Sampah yang telah konsisten melakukan gerakan pengelolaan sampah
2	Sasaran 2.1 Seluruh lokus di BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II DLH Kabupaten Bandung terlayani pengumpulan sampah	Sarana pengangkutan yang masih terbatas	<i>Political will</i> Kepala Daerah	Mengefektifkan semua sarana dan prasarana pengangkutan sampah untuk melayani pengumpulan sampah di lokus BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II DLH Kabupaten Bandung
	Sasaran 2.2 Terwujudnya perluasan jangkauan dan peningkatan persentase pelayanan pengangkutan	Faktor geografis wilayah kabupaten bandung yang	Menerapkan sistem logistis berundak (<i>transfer station</i>)	

No	Sasaran	Faktor keberhasilan		Kebijakan
		Penghambat	Pendukung	
	sampah domestik secara berkala menuju TPA	luas dan berkontur		
3	TPST di lokus BLUD Pengelolaan Persampahan Wilayah II DLH Kabupaten Bandung bekerja dengan optimal	Masih terbatasnya SDM pengelola TPST di lokus BLUD Pengelolaan Persampahan di Wilayah II Kabupaten Bandung	Pembinaan yang terus menerus dari DLH	Memperkuat kapasitas SDM dan manajemen operasional TPST di lokus BLUD Pengelolaan Persampahan Wilayah II DLH Kabupaten Bandung
4	Sasaran 4.1 Seluruh unit kerja kegiatan penanganan sampah di BLUD Pengelolaan Persampahan wilayah II DLH Kabupaten Bandung berjalan optimal	Koordinasi yang belum kuat anatar pihak pihak yang terkait dalam penanganan sampah	Pembinaan yang terus menerus dari DLH	Optimalisasi seluruh unit kerja kegiatan penanganan dan pengurangan sampah di BLUD Pengelolaan Sampah wilayah II DLH Kabupaten Bandung
	Sasaran 4.2 Seluruh unit kerja kegiatan pengurangan sampah di BLUD Pengelolaan Persampahan wilayah II DLH Kabupaten Bandung berjalan optimal	Koordinasi yang belum kuat anatar pihak pihak yang terkait dalam pengurangan sampah	Pembinaan yang terus menerus dari DLH	

5.2 Program Strategis

No	Kebijakan Strategis	Intervensi	Asumsi	Program Strategis
1	Memperkuat dan memberikan rewards atau penghargaan secara priodik bagi pengelola TPS3R maupun	Bermitra dengan Dinas lain yang terkait dan CSR	Konsitensi penguatan dan dukungan dari mitra dan pihak terkait	1. Melakukan sosialisasi dan kampanye pentingnya masyarakat untuk melakukan aktivitas pemilahan

No	Kebijakan Strategis	Intervensi	Asumsi	Program Strategis
	Bank Sampah serta nasabah Bank Sampah yang telah konsisten melakukan gerakan pengelolaan sampah.			sampah yang berkelanjutan dengan bermitra dengan pihak terkait (CSR, Filantropi dsb) 2. Menyelenggarakan pemberian penghargaan bagi pengelola TPS3R maupun Bank Sampah serta nasabah Bank Sampah yang telah konsisten melakukan gerakan pemilahan sampah setiap tahun dengan bermitra dengan pihak terkait (CSR, Filantropi dsb)
2	Mengefektifkan semua sarana dan prasarana pengangkutan sampah untuk melayani pengumpulan sampah di lokus BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II DLH Kabupaten Bandung	Menambah sarana dan prasarana pengangkutan sampah	Dukungan yang konsisten dari DLH dan dinas terkait	Melengkapi armada dan infrastruktur pengangkutan sampah sesuai kapasitas BLUD Pengelolaan Persampahan Wilayah II DLH Kabupaten Bandung.
3	Memperkuat kapasitas SDM dan manajemen operasional TPST di lokus BLUD Pengelolaan Sampah	Bermitra dengan Dinas lain yang terkait dan CSR	Ketersediaan jumlah SDM yang cukup	1. Menyelenggarakan penguatan kapasitas teknis individu SDM pengelola TPST 2. Menyelenggarakan penguatan manajemen

No	Kebijakan Strategis	Intervensi	Asumsi	Program Strategis
	Wilayah II DLH Kabupaten Bandung			operasioanl TPST (administrasi, keuangan dan dinamika kelompok)
4	Optimalisasi seluruh unit kerja kegiatan penanganan dan pengurangan sampah di BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II DLH Kabupaten Bandung	Bermitra dengan Dinas lain yang terkait dan CSR	Adanya <i>Political will</i> Kepala Daerah	Menyelenggarakan kegiatan penanganan dan pengurangan sampah bekerjasama dengan mitra terkait (Pentahelix, Oftaker, CSR dsb)

5.3 Kerangka Pendanaan

No	Jenis Layanan	Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Pengumpulan	-	-	-	-	-
2	Pemilahan	-	-	-	-	-
3	Pengangkutan	-	Rp 11.767.528,12	Rp 115.000.000,00	Rp 18.000.000,00	Rp 21.000.000,00
4	Pengolahan	Rp 122.016.000,00	Rp 361.016.000,00	Rp 494.516.000,00	Rp 494.516.000,00	Rp 494.516.000,00
5	Pemrosesan Akhir	-	-	-	-	-
Total		Rp 122.016.000,00	Rp 372.783.528,12	Rp 509.516.000,00	Rp 512.516.000,00	Rp 515.516.000,00

- 5.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (terlampir)
- 5.5 Perkiraan Biaya Operasional (terlampir)
- 5.6 Proyeksi Pendapatan Pengembangan layanan Pengolahan Sampah (terlampir)

BAB VI PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BLUD Pengelolaan Persampahan Wilayah II DLH Kabupaten Bandung periode 2025-2029 ini merupakan dokumen rujukan utama yang mengintegrasikan visi teknis lingkungan dengan fleksibilitas tata kelola keuangan BLUD. Keberhasilan implementasi Renstra ini sangat bergantung pada komitmen seluruh jajaran internal dalam mengoptimalkan potensi pendapatan retribusi, efisiensi operasional pengangkutan, dan pengembangan inovasi pengolahan sampah di Wilayah II. Dengan semangat kemandirian, dokumen ini diharapkan mampu menjawab tantangan kedaruratan sampah di Kabupaten Bandung melalui pelayanan yang lebih responsif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pencapaian target-target yang tertuang dalam dokumen ini membutuhkan sinergi yang kuat antara BLUD, Pemerintah Kabupaten Bandung, mitra swasta, dan partisipasi aktif masyarakat di wilayah cakupan II. Melalui evaluasi berkala dan adaptasi terhadap perkembangan regulasi—termasuk kebijakan terbaru mengenai energi terbarukan—BLUD Pengelolaan Persampahan Wilayah II bertekad untuk menjadi pilar utama dalam mewujudkan Kabupaten Bandung yang bersih, hijau, dan berwawasan lingkungan. Semoga Renstra ini menjadi langkah nyata dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian ekosistem di masa depan.

LAMPIRAN

Program Strategis Dan Kegiatan Strategis BLUD Pengelolaan Sampah Kabupaten Bandung

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal Pencapaian (2025)		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Pena nggu ng Jawa b	Sumbe r Dana (BLUD /APBD)
				2025		2026		2027		2028		2029			
				Terealisasi	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
		PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH	Persentase penurunan volume sampah	30%	Rp. 5.401.795. 100,00		Rp. 3.761.562.1 60,00								
		Pengelolaan sampah	Persentase timbulan sampah yang terangkut sesuai jadwal	30%											
Meningkatkan kepedulian masyarakat untuk melakukan kegiatan pemilahan sampah di	Meningkatkan peran TPS3R dan Bank Sampah dalam pengelolaan sampah di tingkat masyarakat	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	5 kelompok		5 kelompok	25.000.000, 00	6 kelompok	50.000.000 ,00	7 kelompok	50.000.00 0,00	8 kelompok	50.000.00 0,00		
		Pengoperasian	Jumlah fasilitas	56 BSU		57 BSU	12.500.000, 00	59 BSU dan 15 TPS3R	25.000.000 ,00	61 BSU dan 17 TPS3R	25.000.00 00,00	63 BSU dan 19 TPS3R	25.000.00 0,00		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal Pencapaian (2025)		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Pena nggu ng Jawa b	Sumbe r Dana (BLUD /APBD)
				2025		2026		2027		2028		2029			
				Terealisasi	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
lingkungan		dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (TPS3R dan Bank Sampah)	dan 12 TPS3R		dan 13 TPS3R									
Meningkatkan pelayanan pengumpulan sampah di wilayah layanan BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II DLH Kabupaten Bandung	Terselenggaranya pelayanan pengumpulan sampah di lokus BLUD Pengelolaan Sampah Wilayah II DLH Kabupaten Bandung	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	73,34 ton	4.660.528.342,00	73,34 ton	4.660.528.342,00	60,98 ton	5.056.967.591,81	39,02 ton	5.056.967.591,81	31,20 ton	5.054.808.654,40		
		Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	69,23 %		69,23 %		73,08%		76,9%		80,77%			
Optimalisasi	Meningkatnya	Penanganan	Jumlah sampah yang	-		39,23 ton	3.414.467.000,00	50 ton	4.380.842.000,00	60 ton	4.380.842.000,00	70 ton	4.380.842.000,00		

Tujuan	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Data Capaian Pada Tahun Awal Pencapaian (2025)		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Pena nggu ng Jawa b	Sumbe r Dana (BLUD /APBD)
				2025		2026		2027		2028		2029			
				Terealisasi	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
		lainnya sesuai dengan peraturan perundangan													
Meningkatkan kegiatan penanganan dan pengurangan sampah di BLUD Pengelolaan Sampah wilayah II DLH Kabupaten Bandu	Meningkatnya jumlah sampah ditangani	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	73,34 ton		112,57 ton		110,98 ton		99,01 ton		101,20 ton			
	Meningkatnya jumlah pengurangan	Pengurangan sampah melalui pendau	Jumlah sampah yang terdaur ulang	7,27 ton		7,45 ton	12.500.000,00	7,63 ton	25.000.000,00	7,80 ton	25.000.000,00	7,98 ton	25.000.000,00		

Tabel Perkiraan Biaya Operasional

No	Uraian	2025	2026		2027	2028	2029
		Rp	Rp (sesuai DPA)	Rp (Kebutuhan)	Rp	Rp	Rp
1	Gaji Personal	Rp 3.498.744.192,00	Rp 3.498.744.192,00	Rp 3.498.744.192,00	Rp 3.697.704.432,0 0	Rp 3.697.704.432,0 0	Rp 3.697.704.432,0 0
2	BBM Kendaraan	Rp 1.385.184.000,00	Rp 1.385.184.000,00	Rp 1.385.184.000,00	Rp 1.596.384.000,0 0	Rp 1.596.384.000,0 0	Rp 1.596.384.000,0 0
3	BBM Peralatan/ Mesin	Rp 6.516.000,00	Rp 6.516.000,00	Rp 6.516.000,00	Rp 6.516.000,00	Rp 6.516.000,00	Rp 6.516.000,00
4	Pemeliharaan Kendaraan	Rp 927.750.000,00	Rp 927.750.000,00	Rp 927.750.000,00	Rp 1.113.300.000,0 0	Rp 1.113.300.000,0 0	Rp 1.113.300.000,0 0
5	Pemeliharaan Peralatan/ Mesin	Rp 78.000.000,00	Rp 242.000.000,00	Rp 242.000.000,00	Rp 338.000.000,00	Rp 338.000.000,00	Rp 338.000.000,00
6	Biaya Listrik	Rp 12.000.000,00	Rp 36.000.000,00	Rp 36.000.000,00	Rp 48.000.000,00	Rp 48.000.000,00	Rp 48.000.000,00
7	Biaya Pembuangan Sampah ke TPA	Rp 5.317.150,00	Rp 5.317.150,00	Rp 5.317.150,00	Rp 4.421.159,81	Rp 2.828.370,70	Rp 2.262.222,40

8	Gaji Personil UPT	Rp 660.000.000,00	Rp 345.000.000,00	Rp 1.980.000.000,00	Rp 2.640.000.000,00	Rp 2.640.000.000,00	Rp 2.640.000.000,00
9	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilahan			Rp 50.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00
10	Peningkatan Kapasitas SDM BLUD			Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00
TOTAL		Rp 6.573.511.342,00	Rp 6.446.511.342,00	Rp 8.181.511.342,00	Rp 9.594.325.591,81	Rp 9.592.732.802,70	Rp 9.592.166.654,40

Tabel Proyeksi Pendapatan Pengembangan Layanan Pengolahan Sampah

No	Lokasi	2025	2026	2027	2028	2029
		Nilai/Tahun	Nilai/Tahun	Nilai/Tahun	Nilai/Tahun	Nilai/Tahun
1	Kompos Kasgot	Rp -	Rp 2.353.505,62	Rp 3.000.000,00	Rp 3.600.000,00	Rp 4.200.000,00
2	Bahan RDF	Rp -	Rp 1.961.254,69	Rp 2.500.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp 3.500.000,00
3	Sampah Bernilai Ekonomis (Bank Sampah)	Rp -	Rp 784.501,87	Rp 1.000.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.400.000,00
4	Bank Sampah	Rp -	Rp 784.501,87	Rp 1.000.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.400.000,00
5	Jasa Pelayanan Kebersihan		Rp 18.480.000,00	Rp 27.720.000,00	Rp 36.960.000,00	Rp 46.200.000,00
Total Perkiraan Pemasukan dari Off Taker		Rp -	Rp 24.363.764,06	Rp 35.220.000,00	Rp 45.960.000,00	Rp 56.700.000,00
Pendapatan Retribusi		Rp 214.558.510,64	Rp 216.617.828,06	Rp 181.023.936,17	Rp 117.275.000,00	Rp 94.951.595,74
Total Pendapatan		Rp 214.558.510,64	Rp 240.981.592,12	Rp 216.243.936,17	Rp 163.235.000,00	Rp 151.651.595,74
Total Perkiraan Pengeluaran		Rp 6.573.511.342,00	Rp 6.446.511.342,00	Rp 9.594.325.591,81	Rp 9.592.732.802,70	Rp 9.592.166.654,40

Perkiraan Perimbangan Dana	-Rp 6.358.952.831,3 6	-Rp 6.205.529.749,8 8	-Rp 9.378.081.655,64	-Rp 9.429.497.802,70	-Rp 9.440.515.058,66
----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA